



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2017**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
BAGIAN ORGANISASI  
TAHUN 2018

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Ponorogo tahun 2017.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 dan dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Ponorogo yaitu “ **PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS** “.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta memberikan dukungan, bimbingan dan masukan terhadap kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2017.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunianya kepada kita semua, Amin.

Ponorogo, 19 Maret 2018

BUPATI PONOROGO

Drs. H. IPONG MUCHLISSONI

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu Insansi Pemerintah untuk memepertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 yang menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih kedalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan pembangunan. Oleh karenanya seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2017 perlu dievaluasi guna mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Untuk mewujudkan Visi “ **PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS** “, dijabarkan melalui 7 (tujuh) misi, dilakukan berdasarkan 3 (tiga) strategi umum, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja Pemerintah Daerah agar mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya, yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan, sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur.
3. Meningkatkan dan memantapkan pertanian yang diharapkan mampu sebagai penyumbang utama pertumbuhan perekonomian daerah yang berdaya saing dan tangguh serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Ponorogo yang mayoritas adalah petani.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 telah menetapkan Indikator Kinerja dalam setiap sasaran sebagai alat ukur atas keberhasilan atau kegagalan, untuk merepresentasikan pembangunan di Kabupaten Ponorogo selama 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021). Hasil pengukuran keberhasilan / kegagalan dalam capaian setiap sasaran pembangunan yang diukur dengan alat Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tujuan.1 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah, tercapai 86,33 %, dengan parameter penilaian **baik**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran dari 4 (empat) sasaran yang diukur melalui 6 (enam) indikator, menghasilkan capaian 1 (satu) indikator diatas target , 3

(tiga) indikator sama dengan target dan 2 (dua) indikator dibawah target.

2. Tujuan 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah, tercapai 115,63 % dengan parameter penilaian **sangat baik**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran dari 4 (empat) sasaran yang diukur melalui 7 (tujuh) indikator, menghasilkan 2 (dua) indikator diatas target dan 5 (lima) indikator dibawah target.
3. Tujuan 3 : Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantab, tercapai 98,63 % dengan parameter penilaian **baik**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran dari 1 (satu) sasaran yang diukur melalui 2 (dua) indikator, menghasilkan 1 (satu) indikator diatas target dan 1 (satu) indikator dibawah target.
4. Tujuan 4 : Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang mantab dan berdaya saing, tercapai 104,18 % dengan parameter penilaian **sangat baik**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran dari 2 (dua) sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) indikator, menghasilkan 2 (dua) indikator diatas target dan 1 (satu) indikator dibawah target.
5. Tujuan 5 : Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat, tercapai 104,18 % dengan parameter penilaian **sangat baik**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran dari 2 (dua) sasaran yang diukur melalui 4 (empat) indikator, menghasilkan 1 (satu) indikator diatas target dan 3 (tiga) indikator dibawah target.
6. Tujuan 6 : Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat, tercapai 618,91 % dengan parameter penilaian **sangat baik**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran dari 3 (tiga) sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) indikator, menghasilkan 1 (satu) indikator diatas target dan 2 (dua) indikator dibawah target.
7. Tujuan 7 : Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat, tercapai 97,69 % dengan parameter penilaian **baik**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran dari 2 (dua) sasaran yang diukur melalui 3 (tiga) indikator, menghasilkan 1 (satu) indikator sama dengan target dan 2 (dua) indikator dibawah target.
8. Tujuan 8 : Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat, tercapai 101,99 % dengan parameter penilaian **sangat baik**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran dari 2 (dua) sasaran yang diukur melalui 5 (lima) indikator, menghasilkan 3 (tiga) indikator sama dengan target dan 2 (dua) indikator dibawah target.

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	ix
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Penyusunan .....	1
C. Dasar Hukum .....	2
D. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Ponorogo .....	3
E. Organisasi Perangkat Daerah .....	8
F. Isu-isu Strategis .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis .....	13
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	19
C. Perjanjian Kinerja .....	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2017 .....	23
B. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja .....	26
C. Akuntabilitas Keuangan .....	68
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	95
Lampiran - lampiran	

## DAFTAR TABEL

	Hal.	
Tabel 1.1	Luas wilayah Kabupaten Ponorogo menurut Kecamatan.	3
Tabel 1.2	Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 menurut jenis kelamin dan Kecamatan.	5
Tabel 1.3	Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2017.	10
Tabel 1.5	Jumlah PNS berdasarkan golongan tahun 2017.	10
Tabel 2.1	Matrik hubungan antara misi dan tujuan.	15
Tabel 2.2	Matrik hubungan antara tujuan dan sasaran.	16
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017.	19
Tabel 3.1	Pengukuran realisasi kinerja tahun 2017.	24
Tabel 3.2	Perbandingan realisasi kinerja tujuan 1	26
Tabel 3.3	Perbandingan realisasi kinerja tujuan 1 s/d akhir periode RPJMD.	26
Tabel 3.4	PAD Kabupaten Ponorogo tahun 2013-2017	32
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi kinerja tujuan 2.	33
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi kinerja tujuan 2 s/d akhir periode RPJMD.	33
Tabel 3.7	Pertumbuhan usaha mikro tahun 2014-2017.	35
Tabel 3.8	Pertumbuhan IKM tahun 2014-2017.	36
Tabel 3.9	Jumlah pengunjung wisata Kabupaten Ponorogo tahun 2013-2017.	38
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 3.	40
Tabel 3.11	Perbandingan realisasi kinerja tujuan 3 s/d akhir periode RPJMD.	40
Tabel 3.12	Perbandingan realisasi kinerja tujuan 4.	44
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4 s/d Akhir Periode RPJMD.	44
Tabel 3.14	Perbandingan realisasi kinerja tujuan 5.	49
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Tujuan 5 s/d Akhir Periode RPJMD.	49
Tabel 3.16	Perbandingan realisasi kinerja tujuan 6.	53
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6 s/d Akhir Periode RPJMD.	53
Tabel 3.18	Perbandingan realisasi kinerja tujuan 7.	58
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 7 s/d Akhir Periode RPJMD.	58
Tabel 3.20	Perbandingan realisasi kinerja tujuan 8.	63
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 8 s/d Akhir Periode RPJMD.	63
Tabel 3.22	Alokasi anggaran belanja per sasaran strategis tahun 2017.	68
Tabel 3.23	Pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2017.	70
Tabel 3.24	Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2017.	75
Tabel 3.25	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan	81

	Pembiayaan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017.	
Tabel 3.26	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017.	83
Tabel 3.27	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017.	87
Tabel 3.28	Kriteria Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah.	88
Tabel 3.29	Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2017.	88
Tabel 3.30	Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah.	89
Tabel 3.31	Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2017.	90
Tabel 3.32	Perhitungan Rasio Aktifitas (Keserasian) Belanja Operasional dan Belanja Modal Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2017.	91
Tabel 3.33	Surplus/Defisit Anggaran dan Perhitungan Rasio Pengelolaan Belanja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2017.	92
Tabel 3.34	Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2017	93
Tabel 3.29	Capaian kinerja sasaran Terwujudnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan tahun 2016.	67
Tabel 3.30	Capaian kinerja sasaran Meningkatnya ketersediaan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata tahun 2016.	69
Tabel 3.31	Capaian kinerja sasaran Meningkatnya derajat status kesehatan masyarakat tahun 2016.	70
Tabel 3.32	Perkembangan AKI dan AKB tahun 2012-2016.	72
Tabel 3.33	Capaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas layanan RSUD tahun 2016.	72
Tabel 3.34	Capaian kinerja sasaran Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan tahun 2016.	75
Tabel 3.35	Capaian kinerja sasaran Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan tahun 2016.	76
Tabel 3.36	Capaian kinerja sasaran Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga tahun 2016.	76
Tabel 3.37	Anggaran Dan Relisasi APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016	77
Tabel 3.38	Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2016	78
Tabel 3.39	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016	80
Tabel 3.40	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2016	87

## DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Peta Kabupaten Ponorogo	3
Gambar 1.2 Perkembangan PDRB Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2016	6
Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo dan Jawa Timur Tahun 2012-2016 (%)	7
Gambar 1.4 Perkembangan IPM Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2016	8
Gambar 3.1 Perkembangan IKM Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017.	28
Gambar 3.2 Perkembangan nilai tukar petani (NTP) Kabupaten Ponorogo tahun 2013-2017	46
Gambar 3.3 Jumlah kunjungan rawat jalan tahun 2012-2016.pengangguran terbuka Kabupaten Ponorogo tahun 2013-2017	55
Gambar 3.4 Jumlah PMKS Kabupaten Ponorogo tahun 2013-3017	56
Gambar 3.5 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Ponorogo tahun 2013-2017	60
Gambar 3.6 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017	61
Gambar 3.7 Angka Harapan Hidup Kabupaten Ponorogo tahun 2013-2017	62
Gambar 3.8 Perkembangan IDG Kabupaten Ponorogo tahun 2013-2017	65
Gambar 3.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 2013-2017	67

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Pada era otonomi daerah penerapan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) akan memberi kontribusi yang strategis kepada daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing daerah, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas merupakan salah satu pemahaman prinsip terpenting dalam penerapan *Good Governance*, karena akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah.

## **B. TUJUAN PENYUSUNAN**

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Penyampaian informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Sebagai bahan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

3. Mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan terpercaya sehingga dapat berperan secara aktif, efisien dan ekonomis serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif.

### C. **DASAR HUKUM**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XII/MPR/II/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyempurnaan Ukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017.

## D. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

### Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Ponorogo terletak antara 111°7' -111°52' Bujur Timur dan 7°49' - 8°20' Lintang Selatan, luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi ke dalam 21 Kecamatan, 307 desa/kelurahan, 1.002 lingkungan/dusun, 2.274 rukun warga (RW) dan 6.869 rukun tetangga (RT).

Batas-batas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk.
- Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek
- Selatan : Kabupaten Pacitan
- Barat : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri

Gambar 1.1  
Peta Kabupaten Ponorogo



Luasan wilayah kecamatan dan jumlah desa / dusun pada masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Luas wilayah Kabupaten Ponorogo menurut Kecamatan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa / Kel.	Jumlah Dusun	RW	RT
1	Siman	37,95	18	45	95	289
2	Ponorogo	22,31	19	44	119	405
3	Babadan	43,93	15	56	123	480
4	Jenangan	59,44	17	60	120	402
5	Bungkal	54,01	19	63	129	340
6	Sambit	59,83	16	46	93	302
7	Sawoo	124,71	14	54	160	490
8	Mlarak	37,20	15	49	104	267
9	Jetis	22,41	14	41	81	216
10	Sooko	55,33	6	27	106	257
11	Pudak	48,92	6	19	31	79
12	Pulung	127,55	18	67	165	465
13	Ngebel	59,50	8	31	67	165

14	Kauman	36,61	16	54	113	303
15	Jambon	57,48	13	44	76	278
16	Badegan	52,35	10	34	45	229
17	Sampung	80,61	12	44	88	320
18	Sukorejo	59,58	18	58	139	388
19	Ngrayun	148,76	11	40	145	439
20	Slahung	90,34	22	61	154	413
21	Balong	56,96	20	65	121	342
	Jumlah	1.371.780	307	1.002	2.274	6.869

*Sumber data : RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2021*

Berdasarkan data tersebut Kecamatan Ngrayun merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas mencapai 148,76 Km<sup>2</sup>. Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Slahung dengan total 22 Desa. Untuk kecamatan yang memiliki jumlah dusun terbanyak adalah Kecamatan Balong dengan total 65 dusun. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ponorogo dengan luas wilayah 22,31. Kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Sooko dan Pudak masing-masing memiliki 6 desa. Untuk kecamatan dengan jumlah dusun paling sedikit adalah Kecamatan Pudak.

Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan dataran rendah. Berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut dapat dikelompokkan menjadi 245 desa/kelurahan berada pada ketinggian dibawah 500 m diatas permukaan laut, 44 desa berada pada 500-700 m diatas permukaan laut; dan 18 desa berada diketinggian lebih dari 700 m diatas permukaan laut.

Kabupaten Ponorogo memiliki sungai 17 sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber irigasi. Karena mata pencaharian utama masyarakat adalah petani maka irigasi menjadi hal yang penting dalam meningkatkan produktifitas petani. Adapun sungai yang paling panjang adalah sungai Sungkur yang panjangnya mencapai 58,10 Km, sedangkan yang paling pendek adalah sungai Bedingin yang panjangnya hanya 4 Km. Sedangkan diantara sungai yang ada di Kabupaten Ponorogo, Sungai Asin mampu mengairi sawah paling tinggi mencapai 5.656 hektar, sedangkan yang paling rendah adalah Sungai Gonggang yang hanya mampu mengairi sawah sebanyak 25 hektar.

### **Kondisi Demografi**

Jumlah Penduduk di Ponorogo tahun 2017 sebesar 951.738 jiwa dengan komposisi laki-laki 477.217 jiwa (50,14%) dan Perempuan 474.521 (49,86%). Jumlah Penduduk Ponorogo menurut jenis kelamin dan kecamatan sebagai berikut.

Tabel 1.2  
Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 2017  
menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Slahung	27.076	26.996	54.072
2	Ngrayun	30.517	29.038	59.555
3	Bungkal	18.902	19.330	38.232
4	Sambit	20.055	20.123	40.178
5	Sawoo	30.735	30.301	61.036
6	Sooko	12.231	12.347	24.578
7	Pulung	26.125	26.168	52.293
8	Mlarak	17.631	17.624	35.255
9	Jetis	15.784	15.663	31.447
10	Siman	23.243	22.975	46.218
11	Balong	23.706	23.961	47.667
12	Kauman	23.334	23.401	46.735
13	Badegan	16.813	16.771	33.584
14	Sampung	20.110	20.110	40.220
15	Sukorejo	28.732	28.612	57.344
16	Babadan	34.943	34.714	69.657
17	Ponorogo	38.285	38.394	76.679
18	Jenangan	30.391	30.210	60.601
19	Ngebel	10.880	10.637	21.517
20	Jambon	23.130	22.558	45.688
21	Pudak	4.594	4.588	9.182
	Jumlah	477.217	474.521	951.738

*Sumber Data : Dinas Dukcapil Kabupaten Ponorogo*

### **Kondisi Perekonomian Daerah**

Kondisi ekonomi makro daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung laju pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi banyak ditentukan oleh berbagai faktor seperti laju inflasi, pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Total nilai tambah yang mampu dihasilkan oleh seluruh kegiatan perekonomian di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 mencapai nilai 16,42 triliun rupiah. Angka ini meningkat 10,08 % dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 14,92 triliun rupiah. Dengan nilai PDRB tersebut, Kabupaten Ponorogo mampu menyumbang kontribusi terhadap perekonomian Jawa Timur sebesar 0,88 %. Berikut ini tabel perkembangan PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2011-2016.

Gambar 1.2  
Perkembangan PDRB Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2011-2016 (Juta Rupiah)



Sumber data : Analisis Perekonomian Daerah Kab. Ponorogo Tahun 2017

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun Dasar 2010

Ket: \*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

Kinerja perekonomian Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 menurut penghitungan tahun dasar 2010 mencapai 5,29 % , bergerak sedikit lebih cepat dibanding tahun 2015 (5,25 %). Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang melaju hingga 5,55 %. Pada level Jawa Timur kinerja perekonomian mengalami percepatan dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 5,44 %.

Berikut adalah gambar laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

Gambar 1.3.  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo dan Jawa Timur  
Tahun 2012-2016 (%)



Sumber data : Analisis Perekonomian Daerah Kab. Ponorogo Tahun 2017

\*)Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara

### Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan IPM Kabupaten Ponorogo selama tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ponorogo sebesar 66,16 naik hingga mencapai 68,93 di tahun 2016 dengan pertumbuhan rata-rata 1,09 % per tahun. Secara umum dapat dikatakan bahwa kenaikan angka IPM menandakan pembangunan manusia di Kabupaten Ponorogo mengalami kemajuan ke arah yang lebih baik. Nilai yang meningkat telah menaikkan peringkat IPM Kabupaten Ponorogo di Provinsi Jawa Timur dari peringkat 22 pada tahun 2012, kemudian naik menjadi peringkat 21 pada periode 2013 hingga 2015, namun turun kembali menjadi peringkat 22 dari 38 Kabupaten / Kota pada tahun 2016.

Gambar 1.4  
Perkembangan IPM Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2012-2016



Sumber data : Analisis Pembangunan Manusia tahun 2017

## E. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

### Struktur Organisasi

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, susunan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

**“ Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah “.**

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan pada Peraturan Daerah tersebut adalah :

a. **Sekretariat Daerah**, terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dan Bagian Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Administrasi Perekonomiaan, Bagian Administrasi Pembangunan , Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan Bagian Layanan Pengadaan.
4. Asisten Administrasi Umum yang membawahi 3(tiga) Bagian yaitu : Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Humas dan Protokol.

b. **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

c. **Inspektorat.**

d. **RSUD Dr. Harjono.**

e. **Dinas**, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Pariwisata
3. Dinas Pemuda dan Olah Raga
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Satuan Polisi Pamong Praja
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
12. Dinas Tenaga Kerja
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Ketahanan Pangan
18. Dinas Pertanian dan Perikanan
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

f. **Badan**, terdiri dari :

1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
3. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

g. **Kecamatan**, yaitu Kecamatan Ponorogo, Jenangan, Babadan, Siman, Kauman, Sukorejo, Sampung, Badegan, Jambon, Balong, Slahung, Bungkal, Ngrayun, Sambit, Sawoo, Mlarak, Jetis, Pulung, Ngebel, Sooko dan Pudak.

h. **Kelurahan**, yaitu : Kelurahan Paju, Brotonegaran, Pakunden, Kepatihan, Surodikraman, Purbosuman, Tonatan, Bangunsari, Tamanarum, Kauman, Tambakbayan, Pinggirsari, Mangkujayan, Banyudono, Nologaten, Cokromenggalan, Keniten, Jingglong, Beduri, Setono, Singosaren, Kertosari, Kepatihan Wetan, kadipaten, Ronowijayan dan Mangunsuman.

## Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Kabupaten Ponorogo per 31 Desember 2017 sejumlah 10.211 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Lulusan SD	-
2	Lulusan SMP	82
3	Lulusan SLTA	198
4	Lulusan Diploma 1	2.055
5	Lulusan Diploma 2	38
6	Lulusan Diploma 3	685
7	Lulusan Diploma 4	989
8	Lulusan S-1	52
9	Lulusan S-2	5.634
10	Lulusan S-3	478
	Jumlah	10.211

Sumber data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Ponorogo

Tabel 1.4  
Jumlah PNS berdasarkan Golongan Tahun 2017

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Golongan 1	160
2	Golongan 2	2.394
3	Golongan 3	3.731
4	Golongan 4	3.926
	Jumlah	10.211

Sumber data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Dengan melihat data diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik, dimana apabila dilihat dari segi pendidikan, maka PNS dengan tingkat pendidikan S-2 yang terbanyak dan yang terkecil adalah PNS dengan tingkat pendidikan D-II, sedangkan apabila dilihat dari golongan, maka komposisi terbesar adalah golongan IV dan komposisi yang terkecil adalah golongan I.

## F. ISU – ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

- Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur pertanian.
- Peningkatan produktifitas pertanian yang kompetitif dan berdaya saing dengan mengembangkan industri pertanian berbasis organik, serta industri kecil kreatif

yang berdaya saing.

- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan.
- Penurunan angka kemiskinan dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi dan pembentukan / pengembangan BUMDes.
- Penurunan angka pengangguran dengan memperhatikan iklim usaha dalam rangka penciptaan wirausaha baru dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah sesuai potensi wilayah.
- Peningkatan perekonomian daerah dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan berbasis wilayah.
- Peningkatan akses dan sarana transportasi penduduk dan barang antar wilayah di Kabupaten Ponorogo.
- Peningkatan tatakelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat.
- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air minum, layanan sanitasi dan penataan kawasan kumuh.
- Peningkatan kerjasama antar wilayah perbatasan.

## G. **SISTIMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja ( LKj ) Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

Uraian tentang latar belakang permasalahan, maksud dan tuju-tujuan penyusunan, dasar hukum, gambaran umum daerah, organisasi perangkat daerah, isu-isu strategis dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar perjanjian kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2017.

### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Uraian tentang capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2017 meliputi pengukuran kinerja, perkembangan realisasi kinerja masing-masing sasaran, evaluasi dan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja serta realisasi anggaran.

### **Bab IV : Penutup**

Uraian tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja ( LKj ) Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2017 dan memberikan rekomendasi yang mungkin untuk dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.

**Lampiran - lampiran**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 ini berdasarkan Rencana Strategis Kabupaten Ponorogo tahun 2016 -2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Ukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021.

#### **1. Visi**

Visi Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 adalah :

**“ PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS “**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

**Lebih Maju** : Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Ponorogo yang lebih maju, lebih unggul dan lebih memiliki daya saing dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya dimana masyarakat memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin, terpenuhi kebutuhan pokok dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kondisi lebih maju yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat Ponorogo modern yang lebih sejahtera.

**Berbudaya** : Suatu tatanan kehidupan yang dicirikan dengan semakin menguatnya budaya lokal sehingga berdampak terhadap mantapnya kepribadian dan daya saing daerah dalam rangka menghadapi persaingan global. Penguatan budaya lokal akan mendorong penguatan karakter dan jatidiri bangsa secara keseluruhan.

**Religijs** : Suatu kondisi yang dicirikan dengan meningkatnya akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks spiritual.

## 2. Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Kabupaten Ponorogo menjabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi yaitu :

**Misi 1** : Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap, dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah.

**Misi 2** : Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif dan berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan, dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.

**Misi 3** : Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Misi 4** : Membangun pertanian sebagai pengembangan model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdayasaing tangguh.

**Misi 5** : Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai dan berwawasan lingkungan.

**Misi 6** : Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja, dan melindungi hak-hak masyarakat yang berlandaskan pada penegakan hukum yang berkeadilan.

**Misi 7** : Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang cukup. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang bertakwa, berbudaya dan berkepribadian.

## 3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis strategis.

Tabel 2.1  
Matrik hubungan antara Misi dan Tujuan

	MISI	TUJUAN	INDIKATOR
1	Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang amanah, tanggap, dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan.	Indeks Reformasi Birokrasi.
2	Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif dan berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan dan pengembangan pariwisata sebagai lokomotif penggerak perekonomian daerah.	Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah.	1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Indeks Gini.
3	Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap.	Indeks Infrastruktur
4	Membangun pertanian sebagai pengembangan model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdayasaing tangguh.	Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang mantap dan berdaya saing.	PDRB Sektor Pertanian
5	Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai dan berwawasan lingkungan.	Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
6	Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja, dan melindungi hak-hak masyarakat yang berlandaskan pada penegakan hukum yang berkeadilan.	Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan dan perluasan lapangan kerja, serta penegakan Perda.	Angka kemiskinan.

	MISI	TUJUAN	INDIKATOR
7	Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan	1. Mewujudkan pendidikan dan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang cukup, membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang bertakwa, berbudaya dan berkepribadian.	kesehatan yang merata dan berkualitas.	
	2. Mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemuda dan perlindungan anak dan manula serta pemantapan keluarga berencana (KB).	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).

#### 4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2  
Matrik hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	1 Terwujudnya pelayanan prima	1. IKM
		2 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	1. Nilai SAKIP 2. Nilai LPPD 3. Opini BPK
		3 Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.	1. Rasio PAD terhadap total pendapatan.
		4 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.	1. Indeks Desa Membangun
2 Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah.	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Indeks Gini	1 Meningkatnya potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro	1. Persentase pertumbuhan usaha mikro 2. Persentase koperasi sehat
		2 Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan	1. Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM). 2. Persentase PDRB Sektor Perdagangan. 3. Persentase PDRB Sektor Industri.

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
		3 Optimalisasi sektor	1. Jumlah

				pariwisata	kunjungan wisata
			4	Meningkatkan iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah.	1. Persentase pertumbuhan nilai investasi PMDN.
3	Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap.	Indeks Infrastruktur.	1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.	1. Persentase infrastruktur publik dalam kondisi baik. 2. Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur dasar.
4	Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang mantap dan berdaya saing.	PDRB sektor pertanian.	1	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani.	1. NTP 2. Persentase pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan
			2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	1. Angka kecukupan pangan utama.
5	Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat.	IKLH	1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat.	1. Persentase permukiman sehat
			2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	1. Indeks kualitas air 2. Indeks kualitas udara 3. Indeks tutupan lahan
6	Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan dan perluasan lapangan kerja, serta penegakan Perda.	Angka kemiskinan	1	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.	1. Angka pengangguran terbuka.
			2	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.	1. Persentase penurunan PMKS.
			3	Menurunnya pelanggaran Perda.	1. Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
<b>TUJUAN</b>			<b>SASARAN</b>		
<b>URAIAN</b>		<b>INDIKATOR</b>	<b>URAIAN</b>		<b>INDIKATOR</b>
7	Mewujudkan pendidikan dan	IPM	1	Terwujudnya akses pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah

	kesehatan yang merata dan berkualitas.			yang berkualitas bagi seluruh warga.	2. Angka harapan lama sekolah
			2	Meningkatnya derajat / status kesehatan masyarakat.	1. Usia harapan hidup
8	Mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemuda dan perlindungan anak dan manula serta pemantapan KB.	IPG	1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk.	1. IDG 2. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti. 3. Persentase laju pertumbuhan penduduk.
			2	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.	1. Persentase cabang olahraga yang berprestasi. 2. Persentase organisasi kepemudaan yang berprestasi.

## 5. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2021 tersebut dilakukan melalui tiga strategi pokok pembangunan, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja Pemerintah Daerah agar mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya, yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan, sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diperkuat dengan keteladanan pemimpin, dikelola secara transparan, dapat dipercaya, partisipatif dan senantiasa berjalan diatas prinsip-prinsip demokrasi. Pemerintahan yang baik akan memunculkan kepercayaan dari rakyat sehingga mampu membangun kemitraan yang luas dan dapat menopang pembangunan. Kondisi ini akan menjadi modal dasar bagi terciptanya pembangunan yang mensejahterakan masyarakat serta akselerasi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan secara keseluruhan.
- b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan handal menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan akan memperlancar arus barang dan jasa yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Penyediaan infrastruktur kesehatan dan

pendidikan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian masyarakat. Pengembangan pemukiman dan lingkungan sehat dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

- c. Meningkatkan dan memantapkan pertanian yang diharapkan mampu sebagai penyumbang utama pertumbuhan perekonomian daerah yang berdaya saing dan tangguh serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Ponorogo yang mayoritas adalah petani. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan pengembangan pertanian organik secara bertahap terhadap produk-produk pertanian yang menjadi unggulan Kabupaten Ponorogo, sehingga diharapkan memberikan nilai tambah dan peningkatan daya saing bagi petani Kabupaten Ponorogo terhadap petani pada wilayah Kabupaten sekitar.

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

No.	Tujuan		Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan	1	Terwujudnya Pelayanan Prima.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	79	
		2	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja.	1	Nilai SAKIP	BB
				2	Nilai LPPD	Tinggi
				3	Opini BPK	WTP

No.	Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator kinerja	Target
		3	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.	1	Rasio PAD terhadap total pendapatan	11,32 %
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.	1	Indeks Desa Membangun	0,7154
2	Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah.	1	Meningkatkan potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro.	1	Persentase pertumbuhan usaha mikro.	1,83
				2	Persentase koperasi sehat.	15,00
		2	Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan.	1	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah.	0,22
				2	Persentase PDRB sektor perdagangan.	16,75
				3	Persentase PDRB sektor industri.	6,95
		3	Optimalisasi sektor pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisata	437.610
4	Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah.	1	Persentase pertumbuhan nilai investasi PMDN.	2		
3	Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap.	1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.	1	Persentase infrastruktur publik dalam kondisi baik..	66
				2	Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur dasar.	75
4	Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang mantap dan berdaya saing.	1	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani.	1	Nilai tukar petani.	105,6
				2	Persentase pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan.	2,5
		2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	1	Angka kecukupan pangan utama.	152.970,4
5	Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat.	1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat.	1	Persentase permukiman sehat.	74,95
				2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	1
		2	Indeks kualitas udara.			95,984
		3	Indeks tutupan lahan			48,604

No.	Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator kinerja	Target
6	Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan dan perluasan lapangan kerja, serta penegakan Perda.	1	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.	1	Angka pengangguran terbuka.	7,60 %
		2	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.	1	Persentase penurunan PMKS.	2
		3	Menurunnya pelanggaran Perda.	1	Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	22
7	Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas.	1	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga.	1	Rata-rata lama Sekolah.	7,50
				2	Angka harapan lama sekolah	13,72
		2	Meningkatnya derajat / status kesehatan masyarakat.	1	Usia harapan hidup.	72,39
8	Mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemuda dan perlindungan anak dan manula serta pemantapan KB.	1	Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk.	1	IDG	63,10
				2	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti.	100
				3	Persentase laju pertumbuhan penduduk.	0,20
		2	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.	1	Persentase cabang olahraga yang berprestasi.	9
				2	Persentase organisasi kepemudaan yang berprestasi.	10

### C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2017 menjadi tumpuan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai Komitmen Kinerja Bupati Ponorogo, **sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017.**

Perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo merupakan rangkaian mekanisme fungsi perencanaan mulai dari Perencanaan Strategis (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standart pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

### **A. PENGUKURAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sedangkan skala yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	Lebih dari 75 % s/d 100 %	Baik
3	55 % s/d 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun rincian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya pelayanan prima.			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	74,78	94,66
2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.			
	Nilai SAKIP	BB	B	Belum tercapai
	Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi*	Tercapai
	Opini BPK	WTP	WTP*	Tercapai
3.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.			
	Rasio PAD terhadap total pendapatan.	11,32 %	13,96 %	123,32
4.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.			
	Indeks Desa Membangun	0,7154	0,7154	100
5.	Meningkatnya potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro.			
	Persentase pertumbuhan usaha mikro.	1,83	1,41	77,05
	Persentase koperasi sehat.	15,00	40,00	266,67
6.	Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan.			
	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah.	0,22	0,20	90,91
	Persentase PDRB sektor perdagangan.	16,75	16,63**	99,28
	Persentase PDRB sektor industri.	6,95	6,71 **	96,55
7.	Optimalisasi sektor pariwisata			
	Jumlah kunjungan wisata	437.610	336.710	76,94
8.	Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah.			
	Persentase pertumbuhan nilai investasi PMDN.	2	2,04	102
9.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.			
	Persentase infrastruktur publik dalam kondisi baik..	66	64,11	97,14
	Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur dasar.	75	75,10	100,13

10.	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani.			
	Nilai tukar petani.	105,6	106,81	101,15
	Persentase Pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan.	2,5	3,1*	124,00
11.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.			
	Angka kecukupan pangan utama.	152.970,4	133.689,99	87,40
12.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat.			
	Persentase Permukiman sehat.	74,95	73,23	97,71
13.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.			
	Indeks kualitas air.	65,284	64,17	98,29
	Indeks kualitas udara.	95,984	86,05	89,65
	Indeks tutupan lahan	48,604	64,14	131,96
14.	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.			
	Angka pengangguran terbuka.	7,60 %	3,5 %	153,95
15.	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.			
	Persentase penurunan PMKS.	2	45,85	2.092,50
16.	Menurunnya pelanggaran Perda.			
	Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	22	18	81,82
17.	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga.			
	Rata-rata lama Sekolah.	7,50	6,99	93,20
	Angka harapan lama sekolah	13,72	13,72	100
18.	Meningkatnya derajat / status kesehatan masyarakat.			
	Usia harapan hidup.	72,39	72,29*	99,86
19.	Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk.			
	IDG	63,10	63,08	99,97
	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti.	100	100	100
	Presentase laju pertumbuhan penduduk.	0,20	0,18	110
20.	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.			
	Persentase Cabang olahraga yang berprestasi.	9	9	100
	Persentase Organisasi kepemudaan yang berprestasi.	10	10	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja daerah tahun 2017 dari 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja sasaran, disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 30,30 % dalam kategori **Sangat Baik**, 22 (dua puluh dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 66,67 % dalam kategori **Baik dan** 1 (satu) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 3,03 % tidak mencapai target.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS REALISASI KINERJA

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasinya setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 disajikan sebagai berikut :

- Misi Pertama**, Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap, dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah, dengan **Tujuan pertama Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah.**

Tabel 3.2  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
1	Terwujudnya pelayanan prima	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	79	74,63	74,78
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas	1. Nilai SAKIP	BB	CC	B
		2. Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi*
		3. Opini BPK	WTP	WTP	WTP*
3	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1. Rasio PAD terhadap total pendapatan	11,32 %	11,85 %	13,96 %
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	1. Indeks Desa Membangun	0,7154	0,4076	0,7154

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 s/d Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2017	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1	Terwujudnya pelayanan prima	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	81	74,78	92,32
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas	1. Nilai SAKIP	A	B	Belum tercapai
		2. Nilai LPPD	ST	Tinggi*	Belum tercapai
		3. Opini BPK	WTP	WTP*	Tercapai
3	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1. Rasio PAD terhadap total pendapatan	11,40 %	13,96 %	122,46
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	1. Indeks Desa Membangun	0,8461	0,7154	84,55

Tujuan **mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah** dicapai dengan sasaran dan indikator :

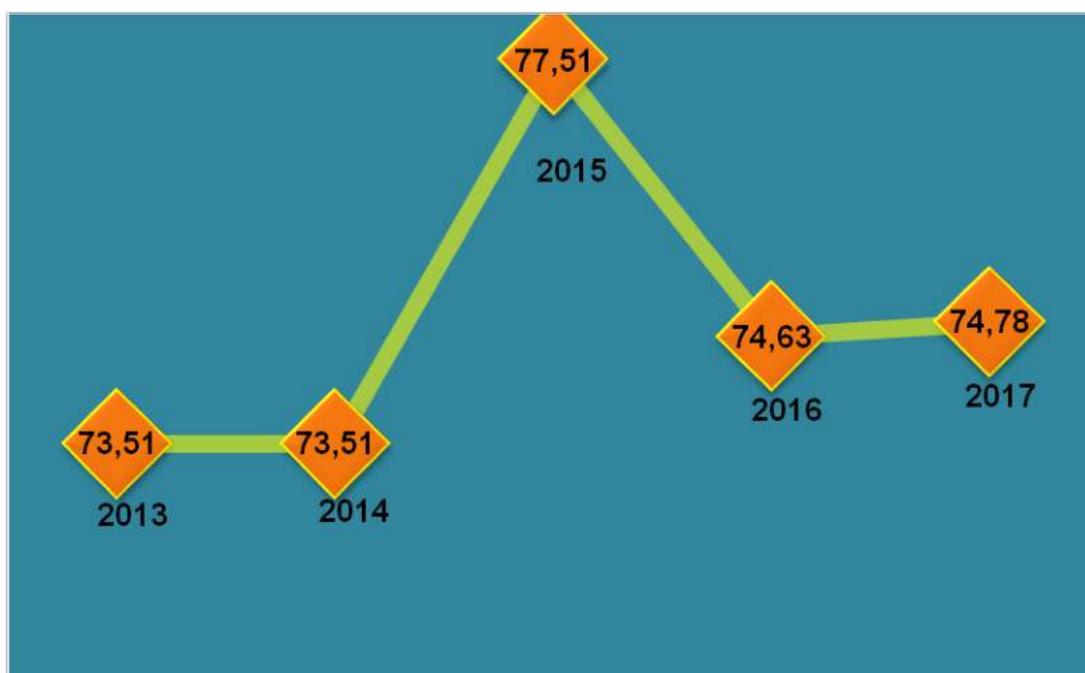
1. **Sasaran Terwujudnya pelayanan prima**, dicapai dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di layanan publik. Pada tahun 2017 Unit Pelayanan yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat sejumlah 60 (enam puluh) Unit Pelayanan. Realisasi nilai IKM tahun 2017 sebesar 74,78 dengan capaian sebesar 94,66 % masuk dalam kategori **sangat baik**, ada peningkatan sebesar 0,15 dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yaitu sebesar 74,63. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

- a. Peningkatan kualitas perilaku (cakap, ramah dan baik) dan keprofesionalan aparatur pemerintah.
- b. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.
- c. Melaksanakan pelayanan sesuai SPP dan SOP.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Program Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. Harjono.

Berikut perkembangan IKM Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017

Gambar 3.1  
Perkembangan IKM Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017



Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kab. Ponorogo

2. **Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas**, dicapai dengan indikator :

a. Nilai SAKIP

Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 mendapatkan predikat B dengan nilai 62,72. Meskipun belum mencapai predikat BB sesuai target yang diharapkan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang didapatkan pada tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 58,43 dengan predikat CC. Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja ini disebabkan adanya komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan sampai dengan level staf untuk memperbaiki kinerjanya.

Langkah strategis yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan terhadap sasaran strategis serta indikator kinerja baik di dokumen RPJMD maupun Renstra SKPD.
2. Cascading Perjanjian Kinerja telah dilakukan sampai dengan eselon IV, namun masih perlu adanya penyempurnaan, baik pada indikator kinerja utama maupun indikator di level eselon III dan IV sehingga dapat tercipta keselarasan penjabaran kinerja.
3. Memperbaiki kualitas hasil evaluasi internal AKIP.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif terhadap capaian kinerja, baik di tingkat Kabupaten maupun di SKPD..
5. Melaksanakan pembinaan melalui pendampingan kepada SKPD.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja.

b. Nilai LPPD

Status Kinerja LPPD Kabupaten, nilai tahun 2017 adalah nilai sementara karena belum dapat dihitung masih menunggu hasil rilis resmi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai tahun 2014 untuk status kinerja LPPD Kabupaten sudah mendapatkan nilai Tinggi (T). Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan :

1. Aspek-aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo yang memiliki capaian kinerja tinggi.
2. Data penyusunan LPPD dikoordinasikan dengan Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa timur.

Program / kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

c. Opini BPK

Opini atas audit BPK, merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas system pengendalian intern. Nilai yang diperoleh tahun 2017 masih nilai sementara karena nilainya masih menunggu rilies / hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk Opini atas audit BPK telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012 s/d tahun 2016 secara berturut-turut. Keberhasilan pencapaian opini WTP ini dikarenakan :

1. Pelaksanaan rekonsiliasi secara rutin setiap bulan terhadap pengelolaan kas, asset tetap dan persediaan bahan habis pakai
2. Pengelolaan asset tetap yang mengalami peningkatan.
3. Kesesuaian laporan keuangan Penda dengan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP).
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

5. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah :

1. Mempertahankan kinerja dan komitmen mulai dari Pimpinan hingga pelaksana kegiatan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah.
3. Penguatan perencanaan kinerja dan anggaran dengan memfokuskan pada prioritas program dan kegiatan.
4. Peningkatan penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih mendalam kepada penyusun laporan keuangan SKPD.
5. Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur pengelola keuangan di seluruh SKPD dengan memberikan pelatihan / bimtek.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab. / Kota dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

**3. Sasaran Meningkatnya kemandirian keuangan daerah,** dengan indikator Rasio PAD terhadap total pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pasal 1 ayat 18 bahwa "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Indikator Rasio PAD terhadap total pendapatan menunjukkan seberapa besar sumbangan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Semakin besar sumbangan yang diberikan semakin besar pula tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah, pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuannya. Sampai saat ini Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih relatif kecil kontribusinya terhadap total Pendapatan secara keseluruhan. Target

pada tahun 2017 sebesar 11,32 % dan terealisasi sebesar 13,96 % dengan capaian sebesar 123,32 % masuk kategori **sangat baik**. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dikarenakan :

- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD dengan tetap memperhitungkan faktor kondusifitas iklim investasi dan penuh kehati-hatian.
- b. Peningkatan PAD merupakan usaha keras dari seluruh instansi di jajaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam upaya menjalankan Kebijakan Umum dan Strategi serta prioritas pendapatan daerah yang sudah ditetapkan.
- c. Peningkatan pelayanan untuk pembayaran PBB dan BPHTB dengan sistem online yaitu SIPDA untuk kemudahan dalam pelayanan dan pencatatan.
- d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur pengelola pajak daerah melalui diklat, bimbingan teknis dan studi banding.
- e. Meningkatnya tingkat kemampuan daya beli dan kesejahteraan masyarakat sehingga penerimaan pajak BPHTB mengalami peningkatan.
- f. Reklasifikasi zona kelas tanah yang menentukan besaran NJOP sehingga peningkatan PAD dapat tercapai.
- g. Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah :

- Menyusun design untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan terkait dengan pendapatan daerah.
- Menginventarisir potensi PAD yang belum melaksanakan tarif sesuai Perda.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berikut perkembangan PAD Kabupaten Ponorogo tahun 2013 – 2017.

Tabel 3.4  
PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah
1	2013	134.097.320.780,57
2	2014	198.730.421.479,94
3	2015	209.561.056.134,82
4	2016	240.111.321.573,88
5	2017	309.359.596.709,01

Sumber data : BPPKAD Kab. Ponorogo

**4. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa,** dicapai dengan indikator Indeks Desa Membangun.

Indeks Desa Membangun sebagai acuan dalam melakukan afirmasi, integrasi dan sinergi pembangunan, kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. Indeks Desa Membangun mengedepankan pendekatan bertumpu kepada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah dan kearifan lokal. Target tahun 2017 sebesar 0,7154 dan terealisasi sebesar 0,7154 dengan capaian sebesar 100 % masuk kategori **sangat baik**, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 maka sebagian besar desa di Kabupaten Ponorogo memiliki status desa berkembang. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan :

- a. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- b. Peran Pemerintah Desa yang cukup baik dalam pembangunan Desa.
- c. Peningkatan SDM melalui pembinaan / pelatihan yang dilakukan secara rutin kepada petugas entry potensi desa dalam pengisian data sehingga pengisian data profil desa sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi lintas sektor.
2. Peningkatan SDM melalui bimtek / pelatihan.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa, Program Penyelenggaraan Penataan Desa, Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Masyarakat Perdesaan dan Program Bina Pemerintahan Desa.

**2. Misi Kedua**, Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif dan berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan, dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah, dengan **Tujuan kedua Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah.**

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
1	Meningkatkan potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro.	1. Persentase Pertumbuhan usaha mikro.	1,83	1,39	1,41
		2. Persentase Koperasi sehat.	15,00	12,22	40,00
2	Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan	1. Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah.	0,22	0,08	0,20
		2. Persentase PDRB sektor perdagangan.	16,75	16,18	16,63**
		3. Persentase PDRB sektor industri.	6,95	6,69	6,71**
3	Optimalisasi sektor pariwisata.	1. Jumlah kunjungan wisata.	437.610	345.818	336.710
4	Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah.	1. Persentase pertumbuhan nilai investasi PMDN.	2	NA	2,04

Tabel 3.6  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2 s/d Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2017	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1	Meningkatkan potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro.	1. Persentase pertumbuhan usaha mikro.	1,90	1,41	74,21
		2. Persentase koperasi sehat.	22,00	40,00	181,82
2	Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan	1. Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah.	0,33	0,20	60,61
		2. Persentase PDRB sektor perdagangan.	17,15	16,63**	96,97
		3. Persentase PDRB sektor industri.	7,15	6,71**	93,85
3	Optimalisasi sektor pariwisata.	1. Jumlah kunjungan wisata.	531.916	336.710	63,30

4	Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah.	1.	Persentase pertumbuhan nilai investasi PMDN.	2	2,04	102,23
---	---	----	--	---	------	--------

Tujuan **Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis potensi daerah** dicapai dengan sasaran dan indikator :

1. **Sasaran Meningkatkan potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro**, dengan indikator :

a. Persentase pertumbuhan usaha mikro. Pertumbuhan usaha mikro ditargetkan tahun 2017 sebesar 1,83 % dan terealisasi sebesar 1,41 % dengan capaian sebesar 77,05 % masuk kategori **baik**. Pertumbuhan usaha mikro tahun 2017 sebesar 1,41 % atau sebanyak 490 unit usaha mikro yang terdiri dari 298 unit usaha perdagangan, 159 unit usaha jasa dan 33 unit usaha industri. Tidak tercapainya indikator kinerja dikarenakan :

1. Tidak memiliki fasilitas akses permodalan dan dianggap tidak bankable bagi perusahaan pembiayaan sehingga embrio-embrio usaha mikro sulit muncul menjadi usaha riil.
2. Persepsi / ketakutan masyarakat bahwa membentuk usaha itu tidak mudah, sehingga masyarakat lebih memilih bekerja ditempat lain dengan penghasilan yang pasti.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja adalah :

- Sulitnya akses permodalan bagi usaha mikro.
- Persaingan pasar yang ketat akan produk-produk usaha mikro lokal dengan produk-produk usaha mikro dari luar daerah / luar negeri.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah :

- Pembentukan lembaga pembiayaan usaha bagi koperasi dan usaha mikro oleh Pemerintah Kabupaten.
- Peningkatan kreatifitas dan kemampuan SDM masyarakat dan usaha mikro melalui pelatihan-pelatihan.
- Promosi produk-produk usaha mikro.

Berikut perkembangan pertumbuhan usaha mikro tahun 2014-2017

Tabel 3.7  
Pertumbuhan usaha mikro tahun 2014-2017

No.	Tahun	Jumlah UM	Peningkatan	% Peningkatan
1	2014	33.597	-	-
2	2015	34.203	606	1,80
3	2016	34.677	474	1,39
4	2017	35.167	490	1,41

Sumber data : Dinas Perdagkum Kab. Ponorogo

b. Persentase koperasi sehat, ditargetkan pada tahun 2017 sebesar 15 % dan terealisasi sebesar 40 % dengan capaian 266,67 % masuk kategori **sangat baik**. Pada tahun 2016, jumlah koperasi yang dinilai sejumlah 90 (sembilan puluh) unit koperasi dengan hasil 11 (sebelas) unit koperasi sehat atau 12,22 %, sedangkan jumlah koperasi yang dinilai pada tahun 2017 sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit koperasi dengan hasil 48 (empat puluh delapan) unit koperasi berkategori sehat atau 40 % dan 72 (tujuh puluh dua) unit koperasi berkategori cukup sehat. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan :

1. Tingkat kesadaran koperasi yang tinggi akan pentingnya kesehatan koperasi.
2. Tingkat kesehatan koperasi menjadi salah satu faktor yang dapat menarik pengguna jasa koperasi tersebut, sehingga mendorong koperasi untuk berlomba mencapai predikat koperasi sehat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah minimnya tenaga penilai kesehatan koperasi yang mempunyai sertifikat penilai kesehatan. Untuk itu langkah yang dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan penilai kesehatan koperasi untuk menciptakan tenaga penilai kesehatan koperasi.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku.

2. **Sasaran Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan**, dengan indikator :

a. Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah. Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan, hingga pada tahun 2017 pertumbuhan IKM sejumlah 33 unit IKM. Target pertumbuhan IKM tahun 2017 sebesar 0,22 % dan terealisasi sebesar 0,20 % dengan capaian sebesar 90,91 % masuk kategori **baik**. Tidak tercapainya target kinerja dikarenakan :

1. Kurangnya minat masyarakat, khususnya pemuda untuk mendirikan usaha Industri Kecil Menengah (IKM). Mereka lebih tertarik untuk menjadi tenaga kerja di luar daerah ataupun luar negeri.
2. Persaingan produk-produk IKM dengan masuknya produk dari luar menimbulkan persepsi dari masyarakat akan sulitnya mendirikan IKM yang mampu bersaing dengan produk yang telah lebih dahulu muncul.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

- Masih rendahnya kemampuan SDM sebagian IKM yang ada sehingga belum mampu berinovasi untuk menciptakan produk mereka dengan varian yang lain.
- Masih sedikitnya fasilitas dari Pemerintah untuk pengembangan produk IKM.

Dalam rangka mengatasi permasalahan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Peningkatan pembinaan ketrampilan dan kemampuan SDM IKM.
- Pembangunan sarana dan prasarana Sentra IKM.

Berikut pertumbuhan IKM di Kabupaten Ponorogo tahun 2014-2017

Tabel 3.8  
Pertumbuhan IKM Tahun 2014-2017

	Tahun	Jumlah IKM	Peningkatan	% Peningkatan
1	2014	16.386	-	-
2	2015	16.418	32	0,20
3	2016	16.431	13	0,08
4	2017	16.464	33	0,20

Sumber data : Dinas Perdagkum Kab. Ponorogo

b. Persentase PDRB sektor perdagangan, meliputi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap total PDRB Kabupaten Ponorogo atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Kontribusi PDRB sektor perdagangan pada tahun 2017 adalah 16,63\*. Nilai ini

merupakan nilai estimasi sementara, hal ini dikarenakan belum adanya rilis resmi dari BPS.

Solusinya :

- Menunggu rilis resmi dari BPS.
- Merencanakan formulasi pengukuran yang baru.
- Menentukan indikator sasaran yang measurable / dapat diukur oleh instansi terkait.

c. Persentase PDRB sektor industri, meliputi industri pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten Ponorogo atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Kontribusi PDRB sektor industri pada tahun 2017 adalah 6,71\*\*, nilai ini merupakan nilai estimasi sementara dikarenakan belum adanya rilis resmi dari BPS.

Solusinya :

- Menunggu rilis resmi dari BPS.
- Merencanakan formulasi pengukuran yang baru.
- Menentukan indikator sasaran yang measurable / dapat diukur oleh instansi terkait.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Pembinaan Lingkungan Sosial, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, Program Pengawasan Tata Niaga Pupuk dan Pestisida, Program Pengembangan Lingkungan Industri Kecil, Program Penyelenggaraan Promosi Dagang dan Program Revitalisasi Pusat Perdagangan.

3. **Sasaran Optimalisasi sektor pariwisata** dengan indikator Jumlah kunjungan wisata. Jumlah kunjungan wisata ini meliputi jumlah kunjungan wisatawan lokal, nasional dan mancanegara. Jumlah kunjungan Wisatawan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 437.610 orang dan terealisasi sebesar 336.710 orang dengan capaian sebesar 76,94 % masuk dalam kategori **Baik**. Ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja dikarenakan :
- a. Daya saing obyek wisata.
  - b. Bertambahnya penyebaran Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) di tiap daerah.
  - c. Kurangnya promosi pariwisata.
  - d. Infrastruktur yang belum memadai.
  - e. Faktor geografis alam / iklim.

f. Kurangnya kualitas SDM pengelola destinasi wisata.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sapta Pesona Pariwisata serta fasilitas di Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
2. Kerjasama dengan Kabupaten sekitar dengan membuat paket wisata.
3. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengadakan event.
4. Diikuti diklat pengelola destinasi wisata untuk pengembangan SDM.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan.

Berikut perkembangan jumlah pengunjung wisata Kabupaten Ponorogo tahun 2013-2017

Tabel 3.9  
Jumlah pengunjung wisata Kabupaten Ponorogo tahun 2013-2017

Wisatawan	Jumlah Pengunjung Wisata (orang)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Wisatawan Nasional	322.248	331.959	369.926	340.710	336.475
Wisatawan Mancanegara	60	0	65	75	235
Jumlah	322.308	331.959	396.991	340.785	336.710

Sumber data : Dinas Pariwisata Kab. Ponorogo

4. **Sasaran Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah** dengan indikator Prosentase Pertumbuhan nilai investasi PMDN. Target tahun 2017 sebesar 2 % dan terealisasi sebesar 2,04 % dengan capaian kinerja 102,23 % masuk kategori **sangat baik**. Nilai investasi PMDN tahun 2017 sebesar Rp. 189.289.779.828,00 ada peningkatan Rp. 3.792.582.828,00 dibandingkan dengan nilai tahun 2016 sebesar Rp. 185.497.197.000,00. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dikarenakan :
- a. Adanya landasan hukum tentang kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
  - b. Adanya dukungan dan komitmen dari para stakeholder.
  - c. Tersedianya jaringan infrastruktur.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan pedoman pelaksanaan penanaman modal.
2. Mengadakan sosialisasi tentang DPMPTSP kepada masyarakat di daerah (kecamatan).
3. Peningkatan sumber daya aparatur melalui bimtek, pelatihan, study banding dll.
4. Peningkatan pengawasan perijinan dan mengoptimalkan penanganan / penyelesaian pengaduan akibat penerbitan ijin.
5. Pemanfaatan teknologi guna memberikan daya dukung untuk pengembangan investasi.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu.

**3. Misi Ketiga**, Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan **Tujuan ketiga Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantab.**

Tabel 3.10  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.	1. Persentase infrastruktur publik dalam kondisi baik.	66	63,29	64,11
		2. Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur dasar.	75	NA	75,10

Tabel 3.11  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 3 s/d Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2017	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.	1. Persentase infrastruktur publik dalam kondisi baik.	74	64,11	86,64
		2. Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur dasar.	79	75,10	94,94

Tujuan **Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantab** dicapai dengan sasaran **Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar**, dengan indikator :

- a. Persentase infrastruktur publik dalam kondisi baik. Target tahun 2017 sebesar 66 % dan terealisasi sebesar 64,11 % dengan capaian sebesar 97,14 % masuk kategori **baik**. Kondisi infrastruktur publik di Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :
  - Panjang jalan Kabupaten Ponorogo dengan total panjang ruas 916,110 km. dimana 510,13 km dalam kondisi baik, 195,59 km dalam kondisi sedang dan 138,07 dengan kondisi rusak serta 72,32 dalam kondisi rusak berat. Untuk memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk yang semakin tinggi diperlukan prasarana berupa jalan yang baik, pada tahun 2017 dilaksanakan pembangunan jalan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan di 21 Kecamatan di Kabupatenponorogo.
  - Jumlah jembatan di Kabupaten Ponorogo sebanyak 383 jembatan, dimana 350 jembatan dalam kondisi baik, 20 jembatan dalam kondisi rusak ringan, 13 jembatan dengan kondisi rusak berat. Untuk menunjang pemenuhan

kebutuhan prasarana penunjang jalan berupa jembatan yang kuat dan aman, pada tahun 2017 dilaksanakan rehabilitasi / pemeliharaan jembatan sebanyak 29 jembatan.

- Luas lahan baku sawah Kabupaten Ponorogo sesuai dengan peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 14/PRT/M/2015 adalah seluas 17.950 Ha, pada Tahun 2017 dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi yaitu peningkatan kondisi dan fungsi 8 buah bendung, perbaikan saluran irigasi sebanyak 66 jaringan irigasi dan 5 rehabilitasi tangkis kali. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat petani pemakai air. Jaringan irigasi diperlukan untuk mendistribusikan pasokan air khususnya bagi lahan pertanian. Dengan bertambahnya dan semakin baiknya jaringan irigasi yang ada maka diharapkan akan meningkatkan luas areal irigasi sehingga akan meningkatkan produksi pertanian dan akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berbagai faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah :

1. Faktor cuaca yang tidak menentu / ekstrem sehingga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, selain itu juga bisa menimbulkan efek memperpendek umur bangunan.
2. Kualitas konstruksi bangunan yang sangat buruk.

Berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Kerusakan jalan banyak yang diakibatkan karena beban kendaraan yang melintas melebihi beban yang direncanakan akibat banyaknya kendaraan barang yang melintas melebihi kapasitas seharusnya (overload).
- Menurunnya kualitas irigasi yang disebabkan belum optimalnya saluran irigasi pada baku sawah.
- Kinerja pelayanan jaringan irigasi belum optimal, yang diakibatkan oleh adanya kerusakan jaringan irigasi.
- Curah hujan yang sangat tinggi sehingga kapasitas alur sungai tidak mencukupi.

Berbagai langkah yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah :

- Meningkatkan pelayanan jaringan jalan yang lebih lancar, tertib dan selamat serta mampu segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- Menyiapkan struktur perkerasan jalan dengan kebutuhan lalu lintas yang ada.

- Membuat gorong-gorong atau saluran yang baik dan memadai.
- Pembuatan sumur resapan supaya mempercepat aliran air.

b. Prosentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur dasar. Pada tahun 2017 dilaksanakan perluasan dan pembangunan :

1. Sistem Penyediaan Pipa Air Minum (SPAM) dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan 4.912 jiwa di 9 (sembilan) Desa/Kelurahan pada 7 (tujuh) Kecamatan.
2. Sistem Pembangunan Air Limbah (SPAL) untuk melayani 1.468 jiwa di 9 (sembilan) Desa / Kelurahan pada 8 (delapan) Kecamatan.
3. Sambungan rumah murah air bersih yang terbangun 628 SRM.

Prosentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur dasar ditargetkan tahun 2017 sebesar 75 % dan terealisasi sebesar 71,10 % dengan capaian 100,13 % masuk kategori **sangat baik**. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dikarenakan :

- Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang rumah layak huni.
- Peningkatan layanan air bersih untuk masyarakat dan rumah tangga yang terlayani sanitasi.
- Program dan anggaran untuk air bersih dan sanitasi yang berbasis masyarakat.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- Membangun sistem secara komprehensif yang ada kaitannya dengan seluruh kegiatan Dinas PKP.
- Optimalisasi layanan air bersih dan sanitasi dasar terutama untuk daerah perdesaan.
- Implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mempermudah pemetaan daerah yang memerlukan prioritas layanan dan perkembangan pencapaian kinerja.
- Membangun sistem berbasis IT dan data kependudukan untuk rencana dan hasil kegiatan (air bersih, pemakaian sanitasi, kawasan kumuh perkotaan dan sebagainya).
- Menyusun RP3K untuk memberi acuan dan konsistensi pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Pembinaan Lingkungan Sosial, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong, Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Pengendalian Banjir, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan / Perkotaan, Program Pengaturan Jasa Konstruksi, Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi, Program Pengawasan Jasa Konstruksi, Program Pemanfaatan Ruang, Program Pengendalian Pemanfaatn Ruang, Program Pengembangan Perumahan, Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

- 4. Misi Keempat**, Membangun pertanian sebagai pengembangan model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdayasaing tangguh, dengan **Tujuan keempat Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang mantab dan berdaya saing.**

Tabel 3.12  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
1	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani.	1. Nilai tukar petani (NTP)	105,6	107,59	106,81
		2. Persentase pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan.	2,5	2,9	3,10
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	1. Angka kecukupan pangan utama.	152.970,4	133.113,54	133.689,99

Tabel 3.13  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4 s/d Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2017	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani.	1. Nilai tukar petani (NTP)	107,85	106,81	99,04
		2. Persentase pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan.	2,5	3,10	124,00
2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	1. Angka kecukupan pangan utama.	173.170,6	133.689,99	77,20

Tujuan **Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang mantab dan berdaya saing**, dicapai dengan sasaran dan indikator :

1. **Sasaran Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani**, dengan indikator :

- a. Nilai Tukar Petani (NTP), merupakan rasio indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. NTP digunakan untuk mengukur kemampuan tukar komoditi produk pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk pertanian. Dalam penghitungannya konsep NTP definisi “petani” mencakup petani yang berusaha dalam usaha tani tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, peternakan (peternak), maupun perikanan (pembudidaya ikan dan nelayan). Banyak faktor yang mempengaruhi harga yang diterima / pendapatan petani maupun harga yang dibayarkan / pengeluaran petani. Pendapatan petani secara langsung dipengaruhi oleh besarnya produksi yang dihasilkan oleh petani. Sedangkan harga yang dibayarkan petani / pengeluaran terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kebutuhan konsumsi (makanan, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dll) dan sarana produksi (bibit, obat, pupuk, upah buruh, sewa lahan, alat mesin pertanian). Jika nilai  $NTP > 100$  berarti petani mengalami surplus,  $NTP = 100$  berarti petani mengalami impas,  $NTP < 100$  berarti petani mengalami defisit.

Pada tahun 2017, NTP sebesar 106,81 dengan capaian sebesar 101,15 % masuk kategori **sangat baik**, bisa diartikan petani mengalami surplus artinya pendapatan petani masih lebih besar jika dibandingkan pengeluarannya. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya NTP mengalami penurunan sebesar 0,78, hal ini berbanding lurus dengan menurunnya capaian rata-rata atas produksi pertanian tanaman pangan, produksi tanaman perkebunan, jumlah produksi peternakan pada tahun 2017. Berbagai permasalahan yang dihadapi terkait pencapaian NTP antara lain :

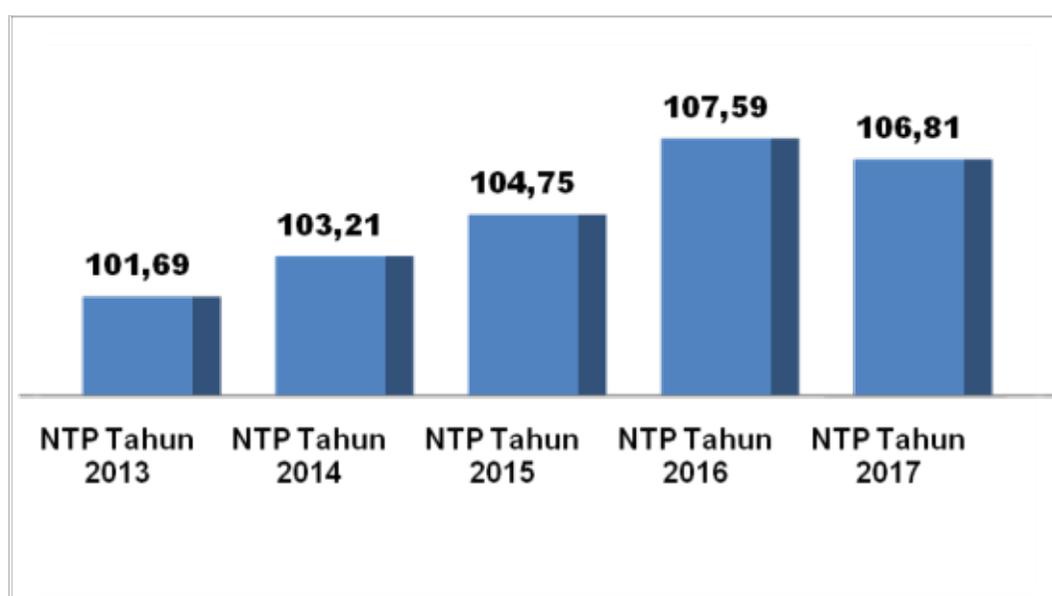
1. Dari sisi pendapatan, antara lain :
  - Menurunnya produksi dan produktifitas beberapa komoditas pertanian.
  - Menurunnya produksi beberapa tanaman perkebunan.
  - Menurunnya produksi beberapa komoditas peternakan.
2. Dari sisi pengeluaran, antara lain :
  - Meningkatnya harga kebutuhan pokok.
  - Meningkatnya harga bibit dan obat-obatan pertanian.
  - Meningkatnya upah buruh serta sewa alsintan.
  - Ada kalanya masih terjadi kelangkaan pupuk pada saat petani membutuhkan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan, antara lain :

1. Penyediaan serta pemerataan bantuan sarana produksi pertanian maupun pembangunan / rehabilitasi infrastruktur pertanian.
2. Berkoordinasi dengan BMKG dalam mitigasi iklim dan curah hujan.
3. Penguatan lembaga tani untuk mendukung sistem usaha pertanian yang maju dan mandiri dengan konsep agribisnis.
4. Pelatihan dan budidaya ternak ruminansia dan ternak unggas.

Berikut perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017

Gambar 3.2  
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2013-2017



Sumber data : Analisis Kemampuan Daya Beli Petani Kab. Ponorogo tahun 2017

- b. Persentase pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan.
- Prosentase pertumbuhan nilai PDRB pertanian (sub kategori pertanian dan perikanan) yang mengacu dari harga konstan (2010) untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha pertanian (sub kategori pertanian dan perikanan) dari tahun ke tahun. Meliputi semua komoditas yang mencakup pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta produksi perikanan baik pembenihan, pembudidayaan maupun penangkapan. Target tahun 2017 sebesar 2,5 % dan terealisasi sebesar 3,10 % dengan capaian 124 % masuk kategori **sangat baik**. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dikarenakan adanya peningkatan jumlah produksi tanaman pangan, baik padi maupun palawija. Produksi paling besar adalah pada ubi kayu dan padi yaitu masing-masing sebesar 479.838 ton dan 518.566 ton namun demikian dilihat dari sisi harga komoditas padi mempunyai harga jual lebih tinggi jika dibandingkan ubi kayu.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja adalah :

1. Menurunnya produksi dan produktivitas beberapa komoditas pertanian.
2. Menurunnya produksi beberapa tanaman perkebunan.
3. Menurunnya produksi beberapa hasil peternakan.
4. Belum optimalnya pengembangan potensi budidaya perikanan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Penyediaan serta pemerataan bantuan sarana produksi pertanian maupun pembangunan / rehabilitasi infrastruktur pertanian / perkebunan.
2. Berkoordinasi dengan BMKG dalam mitigasi iklim dan curah hujan sehingga bisa meramalkan kalender tanam, dan petani dapat menanam komoditi yang tepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya puso sebagai dampak anomali iklim, baik dari segi kebencanaan maupun serangan wabah OPT.
3. Penguatan lembaga tani untuk mendukung sistem usaha pertanian yang maju dan mandiri dengan konsep agribisnis.
4. Meningkatkan pengetahuan petani terhadap sistem pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan;
5. Mendorong POKDAKAN agar mengembangkan agribisnis perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
6. Fasilitasi pembetulan UPR dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan UPR.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Pengembangan Pertanian Organik, Program Peningkatan Produksi Pertanian, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan, Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Program Peningkatan produksi Perkebunan, Program Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Program Pengelolaan Pelayanan Laboratorium, Puskesmas, RSH dan Rumah Potong Hewan.

2. **Sasaran Meningkatnya ketahanan pangan daerah** dengan indikator Angka kecukupan pangan utama.

Ketersediaan pangan utama untuk konsumsi pangan pada masyarakat di Kabupaten Ponorogo mengalami tren kenaikan meskipun tidak begitu signifikan. Kenaikan skor ini mengindikasikan bahwa konsumsi pangan masyarakat Ponorogo mulai mengalami perubahan keragamannya, mulai pangan sumber karbohidrat, ketergantungan pada beras berkurang dan konsumsi sayur sudah lebih banyak namun untuk konsumsi buah-buahan masih perlu ditingkatkan lagi. Konsumsi sayur dan buah-buahan di wilayah pedesaan menggunakan dan memanfaatkan pekarangan dan komoditi lokal, namun di perkotaan masih banyak mengkonsumsi buah-buahan impor.

Target Angka kecukupan pangan utama yang tahun 2017 sebesar 152.970,40 dan terealisasi sebesar 133.689,99 dengan capaian 87,40 % masuk kategori **baik**. Ketidaktercapaian ini dikarenakan :

- a. Partisipasi masyarakat belum merata di seluruh daerah.
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan masih terbatas.
- c. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan pemerataan program dan kegiatan belum optimal.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja adalah :

- Pola konsumsi pangan masyarakat yang masih kurang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- Makanan tradisional kurang memenuhi standar mutu dan gizi.
- Penyebaran informasi serta upaya pengembangannya masih terbatas.
- Sarana dan prasarana yang masih terbatas dalam menunjang pembangunan ketahanan pangan.
- Keterbatasan anggaran yang dikelola, sehingga pembangunan ketahanan pangan masih belum merata dan menjangkau ke seluruh desa.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- Intensifikasi dalam pelatihan pangan pada kelompok binaan secara kontinyu.
- Pembinaan dan pelatihan kepada pengrajin pangan makanan tradisional.
- Media publikasi yang lebih beragam dan inovatif untuk publikasi keanekaragaman pangan.
- Pembuatan ruang / gudang untuk cadangan pangan daerah mengantisipasi kekurangan pasokan pangan.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan).

**5. Misi Kelima**, Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai dan berwawasan lingkungan, dengan **Tujuan kelima Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat.**

Tabel 3.14  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat.	1. Persentase permukiman sehat.	74,95	NA	73,23
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	1. Indeks kualitas air.	65,284	54,55	64,17
		2. Indeks kualitas udara.	95,984	105,24	86,05
		3. Indeks tutupan lahan.	48,604	48,06	64,14

Tabel 3.15  
Perbandingan Realisasi Tujuan 5 s/d Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2017	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat.	1. Persentase permukiman sehat.	78,57	73,23	93,20
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	1. Indeks kualitas air.	67,460	64,17	95,12
		2. Indeks kualitas udara.	98,160	86,05	87,66
		3. Indeks tutupan lahan.	50,780	64,14	126,31

Tujuan **Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat** dicapai dengan sasaran dan indikator :

1. **Sasaran Meningkatkan Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat** dengan indikator Persentase permukiman sehat. Pada tahun 2017 dilaksanakan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu sejumlah 128 unit, relokasi rumah kawasan Waduk Bendo sejumlah 89 unit. Target tahun 2017 sebesar 74,95 % dan terealisasi sebesar 73,23 % dengan capaian sebesar 97,71 % masuk kategori **baik**. Tidak tercapainya target kinerja dikarenakan :
  - a. Belum adanya database jumlah bangunan Pemerintah dan bangunan publik dan rumah tinggal.

- b. Kesadaran masyarakat akan persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung belum optimal.
- c. Pertumbuhan pembangunan bangunan gedung yang tidak disertai dengan regulasi / Perda sebagai persyaratan teknis yang ditetapkan sehingga sering terjadi konflik kepentingan.
- d. Permohonan Ijin Bangunan Gedung diajukan pada saat bangunan gedung sudah terbangun, sehingga ketika terjadi ketidaksesuaian antara bangunan gedung dengan peraturan yang melandasi.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja adalah :

- Belum mempunyai angka yang valid terkait “backlog” perumahan.
- Belum adanya database jumlah rumah tidak layak huni.
- Belum ada data akurat tentang daerah hunian pada kawasan bencana.

Berbagai langkah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah :

- Segera dilakukan penyusunan database jumlah bangunan Pemerintah dan bangunan publik yang memenuhi syarat administrasi dan teknis bangunan gedung.
- Diusulkan perencanaan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan).
- Dilaksanakan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya pemahaman tentang pentingnya syarat administrasi dan teknis bangunan gedung.
- Segera dilakukan penyusunan database jumlah rumah tidak layak huni.
- Implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mempermudah pemetaan daerah yang memerlukan prioritas layanan dan perkembangan pencapaian kinerja.
- Membangun sistem berbasis IT dan data kependudukan untuk rencana dan hasil kegiatan (air bersih, pemakaian sanitasi, kawasan kumuh perkotaan dan sebagainya).
- Menyusun RP3K untuk memberi acuan dan konsistensi pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Pengembangan Perumahan.

## 2. **Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**, dengan indikator :

- a. Indeks kualitas air, merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup khususnya kualitas air badan air pada lingkup dan periode tertentu (kategori baik, sedang, buruk). Target tahun 2017 sebesar 65,284 dan terealisasi sebesar 64,17 dengan capaian sebesar 98,29 masuk dalam kategori **baik**.

- b. Indeks kualitas udara, merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup khususnya kualitas udara ambient pada lingkup dan periode tertentu (kategori baik, sedang, buruk). Target tahun 2017 sebesar 95,984 dan terealisasi sebesar 86,05 dengan capaian sebesar 89,65 masuk dalam kategori **baik**.
- c. Indeks tutupan lahan, merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup khususnya indeks tutupan lahan. Target tahun 2017 sebesar 46,604 dan terealisasi sebesar 64,14 dengan capaian sebesar 131,96 masuk dalam kategori **sangat baik**.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) didapat melalui perhitungan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan. Berdasarkan data nilai indeks tersebut, maka diperoleh hasil IKLH sebesar 71,45. Keberhasilan pencapaian IKLH dikarenakan :

- Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara rutin berupa pengujian kualitas lingkungan di titik-titik yang telah ditetapkan.
- Terlaksananya pengawasan kepada kegiatan / usaha berupa pengujian kualitas limbah cair serta emisi dari kegiatan / usaha sehingga dapat meminimalisir beban pencemaran.
- Semakin banyak kegiatan / usaha yang memiliki dokumen lingkungan sebagai salah satu komitmen kegiatan / usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan.
- Tersedianya data tutupan hutan pada tahun 2017 dari UPT Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang adalah :

- Meningkatkan pengawasan kepada pelaku usaha / kegiatan dalam rangka ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui pendampingan, sosialisasi dan fasilitasi dalam pengelolaan lingkungan.
- Meningkatkan edukasi kepada masyarakat sejak usia sekolah tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Pembinaan Lingkungan Sosial, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

**6. Misi Keenam**, Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja, dan melindungi hak-hak masyarakat yang berlandaskan pada penegakan hukum yang berkeadilan, dengan **Tujuan keenam Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja serta penegakan hukum.**

Tabel 3.16  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
1	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.	1. Angka pengangguran terbuka.	7,6 %	3,94 %	3,5 %
2	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.	1. Persentase penurunan PMKS.	2	1,1	45,85
3	Menurunnya pelanggaran Perda.	1. Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	22	10	18

Tabel 3.17  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6 s/d Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2017	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.	1. Angka pengangguran terbuka.	7,30 %	3,5 %	47,95 %
2	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.	1. Persentase penurunan PMKS.	2	45,85	2.092,50 %
3	Menurunnya pelanggaran Perda.	1. Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	100	18	18

Tujuan **Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja serta penegakan hukum**, dicapai dengan sasaran dan indikator :

1. **Sasaran Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha**, dengan indikator Angka pengangguran terbuka.

Indikator Kinerja Angka Pengangguran Terbuka pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 7,6 % an terealisasi sebesar 3,5 % dengan capaian sebesar 153,95 % masuk dalam kategori **sangat baik**. Capaian indikator kinerja sasaran tidak melebihi target yang telah ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Ponorogo bisa dikurangi / diminimalisir yaitu melalui beberapa penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

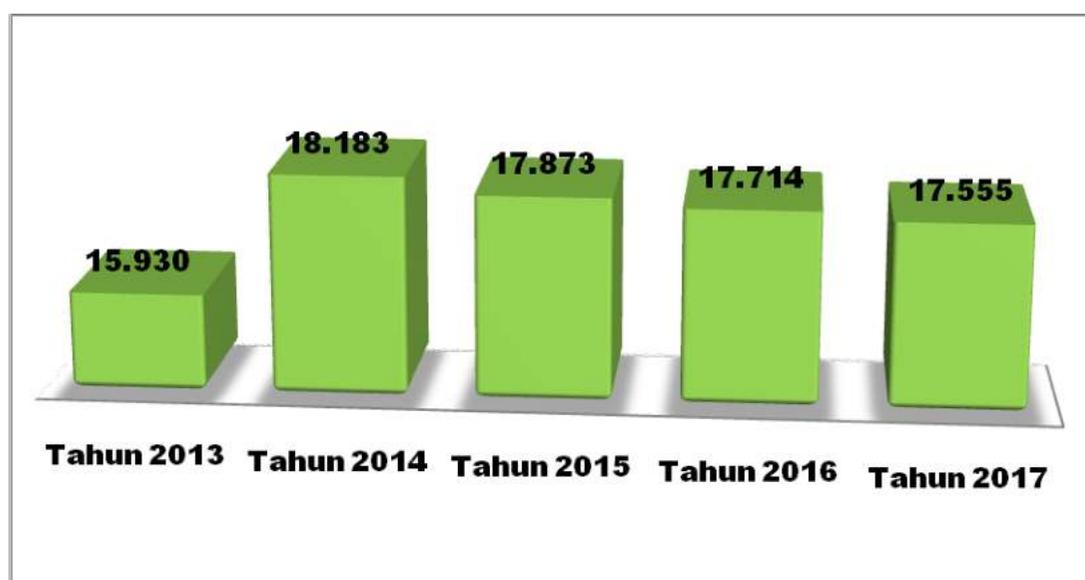
Jumlah pengangguran terbuka tahun 2017 sejumlah 17.555 orang, dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi penurunan jumlah pengangguran terbuka sejumlah 159 orang. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah :

1. Meningkatnya permintaan tenaga kerja / lowongan kerja.
2. Tersedianya informasi lowongan kerja yang luas (Bursa kerja on line ).
3. Adanya sosialisasi tentang lowongan kerja kepada siswa SMK / masyarakat.
4. Adanya program perluasan kesempatan kerja seperti Tenaga Kerja Mandiri, Tehnologi Tepat Guna (TTG), Padat Karya Produktif sehingga masyarakat / pencari kerja menjadi bisa bekerja / diberdayakan, karena kegiatan ini lebih mengutamakan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM).

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Pengembangan Wilayah Transmigran dan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Berikut perkembangan jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017

Gambar 3.3  
Jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2013-2017



Sumber data : Dinas Tenaga Kerja

2. **Sasaran Menurunnya masalah kesejahteraan sosial**, dengan indikator Persentase penurunan PMKS. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah seorang, keluarga atau kelompok yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. PMKS / masyarakat miskin selalu ada, karena hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa angka kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Target tahun 2017 sebesar 2 % dan terealisasi sebesar 45,85 % dan capaian sebesar 2.092,5 % masuk dalam kategori **sangat baik**. Jumlah PMKS tahun 2017 sejumlah 103.852 orang, mengalami penurunan sejumlah 87.961 orang atau 45,85 % dibandingkan dengan tahun 2016. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dikarenakan :
- Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang mendorong berbagai program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin tidak hanya bersumber dari dana APBD, beragam program juga didorong dengan melibatkan sektor swasta dan BUMN.
  - Menurunnya jumlah pengamen, pengemis dan anak jalanan (Anjal / Gepeng).
  - Ketrampilan dan kesiagaan petugas yang menangani PMKS selalu siap setiap saat.
  - Meningkatnya jumlah penerima PKH dari tahun ke tahun.
  - Terbentuknya TRC dan LK3 dan lembaga-lembaga sosial yang ada.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, Program Penanggulangan Berbasis Masyarakat, Program Pembinaan Ex. Penyandang Penyakit Sosial, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma dan Program Penanggulangan Pasca Bencana.

Berikut perkembangan jumlah PMKS Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017.

Gambar 3.4  
Jumlah PMKS Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017



Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Ponorogo

3. **Sasaran Menurunnya pelanggaran Perda**, dengan indikator Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat , merupakan upaya aparat / masyarakat dalam pencegahan dan tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggaran Peraturan Daerah. Target tahun 2017 sebesar 22 % (21 kasus) dan terealisasi sebesar 18 % (19 kasus) dengan capaian 118,18 % masuk dalam kategori **sangat baik**. Berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah :

- a. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan sudah mulai meningkat sehingga tingkat pelanggaran semakin menurun.
- b. Proses administrasi penegakan Peraturan Daerah berjalan dengan tepat.
- c. Adanya sosialisasi Peraturan Daerah.
- d. Kerjasama / koordinasi dengan SKPD yang lain berjalan lancar.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Penindakan non yustisi.
3. Teguran dan peringatan secara lisan dan tertulis.
4. Perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

**7. Misi Ketujuh**, Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang cukup. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang yang bertakwa, berbudaya dan berkepribadian, dengan **Tujuan ketujuh Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas.**

Tabel 3.18  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
1	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga.	1. Rata-rata lama sekolah.	7,50	6,97	6,99
		2. Angka harapan lama sekolah.	13,72	13,69	13,72
2	Meningkatnya derajat / status kesehatan masyarakat.	1. Usia harapan hidup.	72,39	72,18	72,29*

Tabel 3.19  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 7 s/d Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2017	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga.	1. Rata-rata lama sekolah.	8,85	6,69	78,98
		2. Angka harapan lama sekolah.	13,98	13,72	98,14
2	Meningkatnya derajat / status kesehatan masyarakat.	1. Usia harapan hidup.	73,14	72,29*	98,84

Tujuan **Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas**, dicapai dengan sasaran dan indikator :

1. **Sasaran Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga**, dengan indikator :

- a. Rata-rata lama sekolah. Salah satu komponen penting dari pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dengan cakupan penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Target tahun 2017 sebesar 7,50 tahun dan terealisasi 6,99 tahun dengan capaian sebesar 93,20 % masuk dalam kategori **sangat baik**. Ketidaktercapaian ini disebabkan karena penduduk

dalam menjalani pendidikan formal tidak tuntas atau drop out dan kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak rendah.

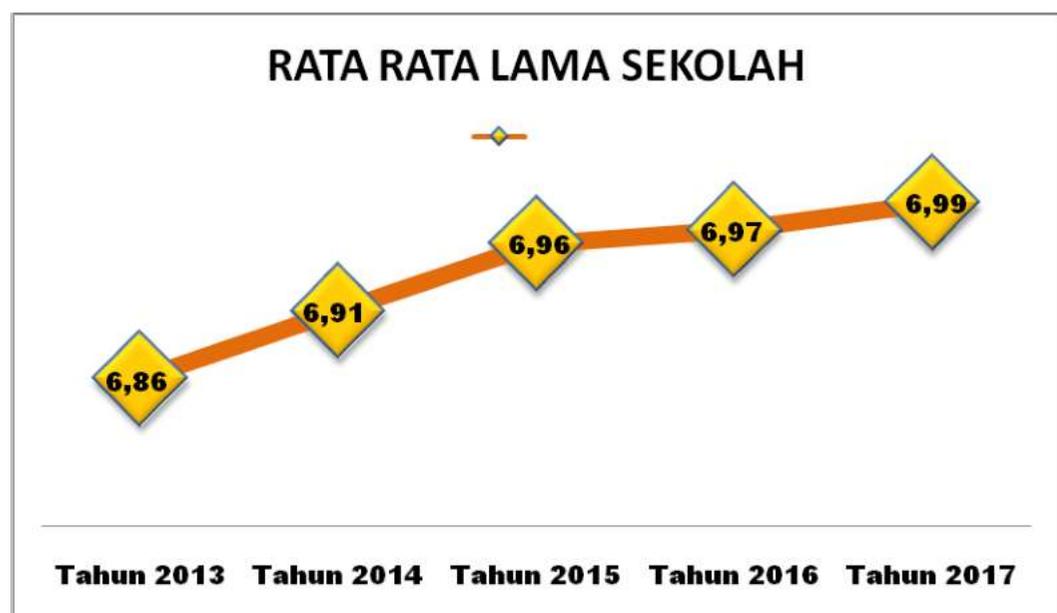
Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, selama kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dari 6,86 tahun pada tahun 2013 meningkat menjadi 6,99 pada tahun 2017. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menaikkan rata-rata lama sekolah, yaitu :

1. Mencukupi daya tampung jenjang pendidikan SD dan SMP.
2. Menurunkan angka droup out.
3. Menaikkan prosentasi kelulusan dan angka melanjutkan.
4. Memberikan wawasan kepada orang tua murid pentingnya pendidikan anak.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Berikut perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017.

Gambar 3.5  
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017



Sumber data : Analisis Pembangunan Manusia 2017

- b. Angka harapan lama sekolah, merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas karena disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada usia 7 tahun, semakin rendah angka harapan lama sekolah di suatu daerah menunjukkan sistem pendidikan yang tidak mendukung terhadap keberlangsungan pendidikan masyarakat artinya

semakin rendah pula harapan penduduk untuk melanjutkan proses pendidikan hingga tingkat akhir.

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 angka harapan lama sekolah tercatat 12,80 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 tercatat 13,72 tahun dengan capaian 100 % masuk kategori **baik**, hal ini dikarenakan adanya ketersediaan dan kemudahan akses terhadap fasilitas pendidikan.

Beberapa kendala / permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja adalah :

1. Masih ada siswa yang drop out dalam menempuh pendidikan.
2. Kesadaran orang tua terhadap pendidikan bagi anak rendah.
3. Mahalnya biaya pendidikan.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

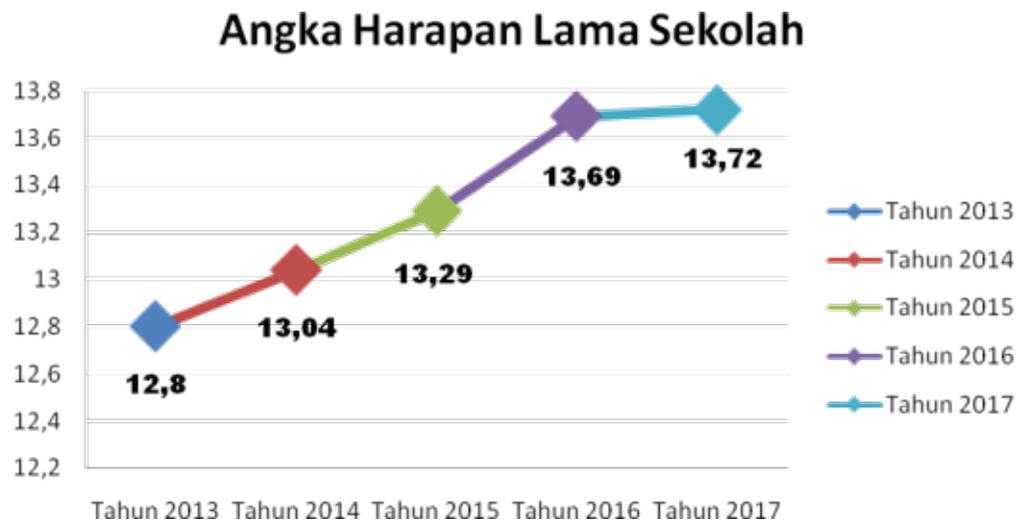
1. Menurunkan angka drop out.
2. Menumbuhkan wawasan dan pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak.
3. Membantu biaya pendidikan anak kurang mampu melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Berikut perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017.

Berikut perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017.

Gambar 3.6  
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2013-2017



Sumber data : Analisis Pembangunan Manusia 2017, Diknas

2. **Sasaran Meningkatnya derajat / status kesehatan masyarakat**, dengan indikator Usia harapan hidup, merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Target UHH tahun 2017 sebesar 72,39 tahun dan terealisasi 72,29 tahun dengan capaian 99,86 % masuk kategori **sangat baik**. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dipengaruhi berbagai faktor yaitu faktor kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, status kesehatan dan tingkat ekonomi. Permasalahan utama dari urusan kesehatan adalah :

- a. Masih tingginya angka kematian ibu (AKI).
- b. Masih ditemukannya kasus gizi buruk setiap tahun.
- c. Meningkatnya kejadian luar biasa (KLB) baik penyakit maupun bencana alam.
- d. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, diabetes mellitus.

Dalam rangka meminimalisir permasalahan yang ada dan sebagai langkah peningkatan realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

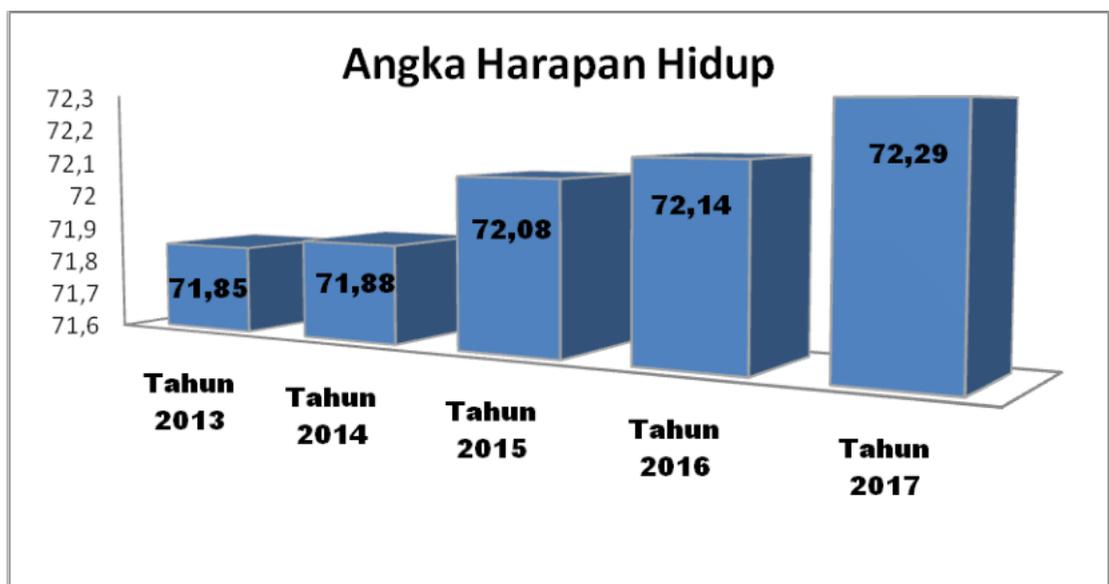
1. Mengembangkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).
2. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit.

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
4. Mendekatkan pelayanan masyarakat melalui POSKESDES, POSYANDU BALITA, POSBINDU, POSYANDU LANSIA dan sebagainya.
5. Meningkatkan ketersediaan logistik kesehatan seperti obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

Berikut perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017.

Gambar 3.7  
Angka Harapan Hidup Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017



Sumber data : Analisis Pembangunan Manusia Tahun 2017

**8. Misi Ketujuh**, Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang cukup. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang yang bertakwa, berbudaya dan berkepribadian, dengan **Tujuan kedelapan Mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemuda dan perlindungan anak dan manula serta pementapan KB.**

Tabel 3.20  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 8

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2016 (n-1)	Th. 2017 (n)
1	Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk.	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	63,10	62,95	63,08
		2. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti.	100	100	100
		3. Persentase laju pertumbuhan penduduk.	0,20	0,22	0,18
2	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.	1. Persentase cabang olahraga yang berprestasi.	9	4,5	9
		2. Persentase organisasi kepemudaan yang berprestasi.	10	5	10

Tabel 3.21  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 8 s/d Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI Th. 2017	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1	Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk.	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,65	63,08	99,10
		2. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti.	100	100	100
		3. Persentase laju pertumbuhan penduduk.	0,16	0,18	88,89
2	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.	1. Persentase cabang olahraga yang berprestasi.	27,3	9	32,97
		2. Persentase organisasi kepemudaan yang berprestasi.	25	10	40

Tujuan **Mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemuda dan perlindungan anak dan manula serta pemantapan KB**, dicapai dengan sasaran dan indikator :

1. **Sasaran meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk**, dengan indikator :

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Isu-isu gender dan anak menggambarkan permasalahan nasional yang harus ditangani secara komprehensif dan berkesinambungan, mengingat masih sedikitnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta serta masih minimnya lembaga yang peduli terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) maupun Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), sehingga minimnya kualitas hidup perempuan yang ada saat ini juga banyaknya kekerasan-kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak (baik yang dilakukan oleh orang tua, teman sebaya maupun orang dewasa).

Pada tahun 2017, IDG Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebesar 63,08 dengan capaian sebesar 99,97 % masuk kategori **sangat baik**, ada peningkatan sebesar 0,14 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 62,96. Peningkatan ini dikarenakan :

1. Perhatian yang besar dari institusi baik Pemerintah maupun swasta yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Adanya data terpilah yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan.
3. Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan kaum perempuan melalui pembinaan dan pelatihan.
4. Melibatkan perempuan dalam sektor pembangunan.
5. Pemantapan gugus tugas yang ada (Fokal Point dan PT-PPO).
6. Mengintegrasikan gender kedalam dokumen perencanaan, penganggaran di semua sektor pembangunan hingga menjadi Anggaran Responsif Gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan dan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Berikut perkembangan IDG dalam lima tahun terakhir dapat disampaikan sebagai berikut.

Gambar 3.8  
Perkembangan IDG Kabupaten Ponorogo tahun 2013-2017



*Sumber data : Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Ponorogo*

- b. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2017 sejumlah 22 kasus dan semua tertangani, dengan capaian kinerja 100 % masuk dalam kategori **sangat baik**. Berbagai tindak kekerasan yang sering terjadi dan menimbulkan korban dikalangan perempuan seperti serangan seksual, kasus pembunuhan terhadap ibu atau nenek baik secara motif ekonomi maupun karena rasa marah yang tidak terkendali, pornografi, tindak kekerasan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangga yang sering terjadi dan umumnya dilandasi oleh rasa jengkel bahkan benci serta beberapa tindak kekerasan lainnya. Keberhasilan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ponorogo dikarenakan telah terbentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, beberapa langkah yang diambil adalah :

1. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui pelatihan dan penyuluhan (legal training).
2. Sosialisasi KDRT.
3. Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik dalam konteks individual, sosial maupun institusional.
5. Melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara sistematis.

6. Membentuk lembaga penyantun korban tindak kekerasan dengan target khusus kaum perempuan dan anak-anak, untuk diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk konsultasi, perawatan medis maupun psikologis.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

c. Laju pertumbuhan penduduk.

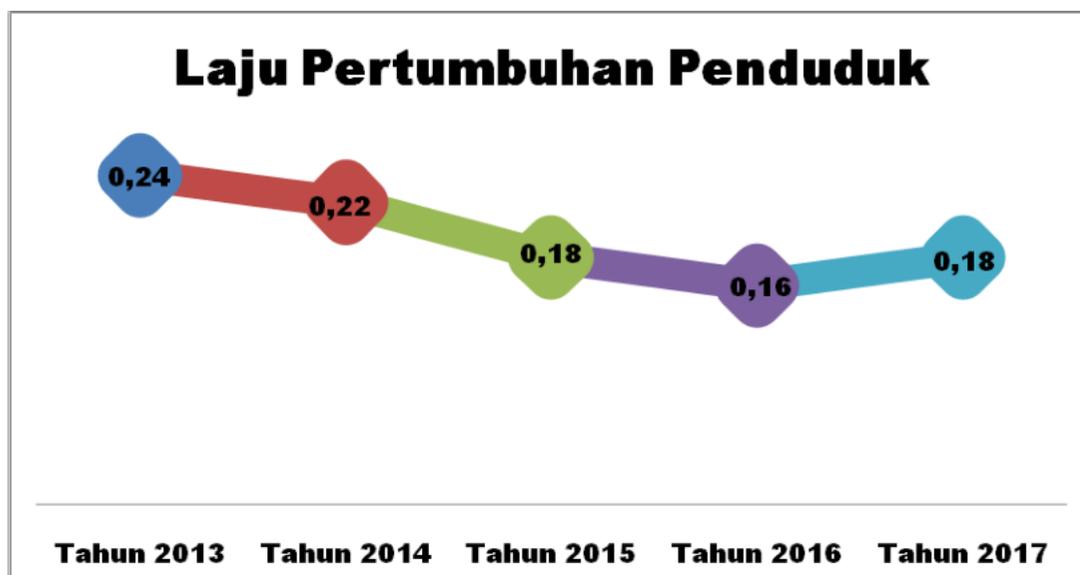
Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), LPP Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 sebesar 0,16 %, artinya bahwa rata-rata peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo adalah sebesar 0,16 % per tahun, sedangkan LPP tahun 2017 sebesar 0,18 % dengan capaian kinerja sebesar 110 % masuk kategori **sangat baik** Kenaikan laju pertumbuhan penduduk dengan mempertimbangkan perbandingan antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian, jumlah penduduk datang dan jumlah penduduk pergi. Dalam rangka menurunkan jumlah kelahiran, perlu ada upaya melalui program KB yaitu pelayanan kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS).

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dikarenakan PUS yang menggunakan kontrasepsi modern semakin meningkat, Unmet need (peserta KB yang tidak terlayani) semakin menurun dan jumlah kelahiran semakin menurun.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri dan Program Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). Berikut perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2017.

Gambar 3.9  
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 2013-2017



Sumber data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Ponorogo

2. **Sasaran meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga**, dengan indikator :

a. **Persentase Cabang olahraga yang berprestasi**

Indikator kinerja Persentase cabang olahraga yang berprestasi di Kabupaten Ponorogo ditargetkan 9 % dan terealisasi sebesar 9 % dengan capaian sebesar 100 % masuk kategori **sangat baik**. Cabang olahraga yang berprestasi tersebut yaitu cabang olahraga Panahan dan Cabang Olahraga Pencak Silat. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja antara lain :

1. Fasilitasi pembinaan Cabor unggulan.
2. Terlaksananya upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan.
3. Tercukupinya fasilitas sarana prasarana seluruh Cabor yang berprestasi. Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Program Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga.

b. **Persentase Organisasi kepemudaan yang berprestasi**

Indikator kinerja Persentase organisasi kepemudaan yang berprestasi di Kabupaten Ponorogo ditargetkan 10 % dan terealisasi sebesar 10 % dengan capaian sebesar 100 % masuk kategori **sangat baik**. Organisasi Kepemudaan yang berprestasi tersebut yaitu PC GP Ansor dan Pemimpin Pemuda Muhammadiyah. Keberhasilan pencapaian target kinerja dikarenakan :

1. Komitmen Pemerintah terhadap pemberdayaan kepemudaan.

2. Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan
3. Pelatihan kewirausahaan bagi Pemuda yang produktif.
4. Koordinasi dan pembinaan secara berkala dan maksimal / regenerasi.

Dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja adalah Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan.

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

#### a. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22  
Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	%
1	Terwujudnya pelayanan prima.	202.403.445.803,00	21,80
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.	46.178.564.058,30	4,97
3	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.	7.717.182.527,00	0,83
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.	4.151.181.650,00	0,45
5	Meningkatnya potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro.	4.429.685.000,00	0,48
6	Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan.	32.006.055.300,00	3,45
7	Optimalisasi sektor pariwisata	7.224.243.600,00	0,78
8	Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah.	328.778.000,00	0,04
9	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.	338.506.574.564,00	36,47
10	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani.	34.496.478.650,00	3,72
11	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	7.248.708.500,00	0,78
12	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat.	15.471.140.000,00	1,67
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	7.562.902.938,00	0,81
14	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.	1.016.050.745,00	0,11
15	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.	15.137.240.500,00	1,63

16	Menurunnya pelanggaran Perda.	1.768.725.000,00	0,19
17	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga.	97.293.530.045,85	10,48
18	Meningkatnya derajat / status kesehatan masyarakat.	20.339.422.486,00	2,19
19	Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk.	1.969.165.000,00	0,21
20	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.	765.015.000,00	0,08
Jumlah		846.014.089.367,15	91,14
Belanja langsung pendukung		82.239.738.092,24	8,86
Total belanja langsung		928.253.827.459,39	100

**b. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.23  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>SASARAN 1</b> Terwujudnya pelayanan prima.	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	74,78	94,66	202.403.445.803,00	187.956.755.503,00	92,86
<b>SASARAN 2</b> Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.	2	Nilai SAKIP	BB	B	Belum Tercapai	46.178.564.058,30	44.391.711.418,00	96,13
	3	Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi *	Tercapai			
	4	Opini BPK	WTP	WTP*	Tercapai			
<b>SASARAN 3</b> Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.	5	Rasio PAD terhadap total pendapatan.	11,32 %	13,96 %	123,32	7.717.182.527,00	7.546.826.689,63	97,79
<b>SASARAN 4</b> Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.	6	Indeks Membangun. Desa	0,7154	0,7154	100	4.151.181.650,00	4.006.970.930,00	96,53

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>SASARAN 5</b> Meningkatnya potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro.	7	Persentase pertumbuhan usaha mikro.	1,83	1,41	77,05	4.429.685.000,00	4.242.197.850,00	95,77
	8	Persentase koperasi sehat.	15,00	40,00	266,67			
<b>SASARAN 6</b> Meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan.	9	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah.	0,22	0,20	90,91	32.006.055.300,00	31.705.112.500,00	99,06
	10	Persentase DRB sektor perdagangan.	16,75	16,63**	99,28			
	11	Persentase PDRB sektor industri.	6,95	6,71**	96,55			
<b>SASARAN 7</b> Optimalisasi sektor pariwisata.	12	Jumlah kunjungan wisata.	437.610	336.710	76,94	7.224.243.600,00	7.163.846.228,00	99,16
<b>SASARAN 8</b> Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah.	13	Persentase pertumbuhan nilai investasi PMDN.	2	2,04	102,00	328.778.000,00	325.968.460,00	99,15

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>SASARAN 9</b> Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.	14	Persentase infrastruktur publik dalam kondisi baik.	66	64,11	97,14	338.506.574.564,00	333.088.755.249,16	98,40
	15	Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur dasar.	75	75,10	100,13			
<b>SASARAN 10</b> Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani.	16	Nilai tukar petani (NTP).	105,6	106,81	101,15	34.496.478.650,00	33.253.199.125,00	96,40
	17	Persentase pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan.	2,5	3,1*	124,00			
<b>SASARAN 11</b> Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	18	Angka kecukupan pangan utama.	152.970,40	133.689,99	87,40	7.248.708.500,00	7.235.667.400,00	99,82
<b>SASARAN 12</b> Meningkatnya akses masyarakat terhadap pemukiman sehat.	19	Persentase permukiman sehat.	74,95	73,23	97,71	15.471.140.000,00	14.821.648.284,00	95,80
<b>SASARAN 13</b> Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	20	Indeks kualitas air.	65,284	64,17	98,29	7.562.902.938,00	6.890.621.596,00	91,11
	21	Indeks kualitas udara.	95,984	86,05	89,65			
	22	Indeks tutupan lahan.	48,604	64,14	131,96			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>SASARAN 14</b> Meningkatkan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.	23	Angka pengangguran terbuka.	7,60 %	3,5 %	153,95	1.016.050.745,00	995.817.360,00	98,01
<b>SASARAN 15</b> Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.	24	Persentase penurunan PMKS.	2	45,85	2.092,50	15.137.240.500,00	14.322.944.102,00	94,62
<b>SASARAN 16</b> Menurunnya pelanggaran Perda.	25	Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	22	18	81,82	1.768.725.000,00	1.729.322.000,00	97,77
<b>SASARAN 17</b> Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga.	26	Rata-rata lama sekolah.	7,50	6,99	93,20	97.293.530.045,85	88.044.822.377,37	90,49
	27	Angka harapan lama sekolah.	13,72	13,72	100			
<b>SASARAN 18</b> Meningkatnya derajat / status kesehatan masyarakat.	28	Usia harapan hidup.	72,39	72,29*	99,86	20.339.422.486,00	18.133.305.808,00	89,15

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
<b>SASARAN 19</b> Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pemba-ngunan dan pengendalian penduduk.	29	IDG	63,10	63,08	99,97	1.969.165.000,00	1.858.047.358,00	94,36
	30	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti.	100	100	100			
	31	Persentase laju pertumbuhan penduduk.	0,20	0,18	110			
<b>SASARAN 20</b> Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.	32	Persentase cabang olahraga yang berprestasi.	9	9	100	765.015.000,00	754.323.700,00	98,60
	33	Persentase organisasi kepemudaan yang berprestasi.	10	10	100			

### c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya , yang merupakan perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut disajikan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3.24  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya pelayanan prima.	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	94,66	92,86	Tidak efisien
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.	2	Nilai SAKIP	Belum Tercapai	96,13	Tidak efisien
		3	Nilai LPPD	Tercapai		
		4	Opini BPK	Tercapai		
3	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.	5	Rasio PAD terhadap total pendapatan.	123,32	97,79	25,53
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.	6	Indeks Desa Membangun	100	96,53	3,47
5	Meningkatnya potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro.	7	Persentase pertumbuhan usaha mikro.	77,05	95,77	76,09
		8	Persentase koperasi sehat.	266,67		
6	Meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan.	9	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah.	90,91	99,06	Tidak efisien
		10	Persentase PDRB sektor perdagangan.	99,28		
		11	Persentase PDRB sektor industri.	96,55		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
7	Optimalisasi sektor pariwisata.	12	Jumlah kunjungan wisata.	76,94	99,16	Tidak efisien
8	Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah.	13	Persentase pertumbuhan nilai investasi PMDN.	102,00	99,15	2,85
9	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.	14	Persentase infrastruktur publik dalam kondisi baik.	97,14	98,40	Tidak efisien
		15	Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur dasar.	100,13		
10	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani.	16	Nilai tukar petani (NTP).	101,15	96,40	16,17
		17	Persentase pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan.	124,00		
11	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	18	Angka kecukupan pangan utama.	87,40	99,82	Tidak efisien
12	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pemukiman sehat.	19	Persentase permukiman sehat.	97,71	95,80	Tidak efisien
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	20	Indeks kualitas air.	98,29	91,11	15,53
		21	Indeks kualitas udara.	89,65		
		22	Indeks tutupan lahan.	131,96		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
14	Meningkatkan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.	23	Angka pengangguran terbuka.	153,95	98,01	55,94
15	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.	24	Persentase penurunan PMKS.	2.092,50	94,62	2.187,12
16	Menurunnya pelanggaran Perda.	25	Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	81,82	97,77	Tidak efisien
17	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga.	26	Rata-rata lama sekolah.	93,20	90,49	Tidak efisien
		27	Angka harapan lama sekolah.	100		
18	Meningkatnya derajat / status kesehatan masyarakat.	28	Usia harapan hidup.	99,86	89,15	Tidak efisien
19	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk.	29	IDG	99,97	94,36	8,96
		30	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti.	100		
		31	Persentase laju pertumbuhan penduduk.	110		
20	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.	32	Persentase cabang olahraga yang berprestasi.	100	98,60	1,40
		33	Persentase organisasi kepemudaan yang berprestasi.	100		

## **2. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah sehingga menyebabkan perlunya pengelolaan keuangan daerah dalam sebuah sistem terpadu. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang merupakan bentuk pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Ini berarti daerah diberi keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggungjawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan tersebut harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan azas desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil

Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan tersebut merupakan bagian dari transfer ke daerah dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

**a. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 disusun dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2016.

Selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 disusun dengan memperhatikan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok - Pokok Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2017 serta mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang terjadi selama Tahun 2016 disamping mempertimbangkan berbagai langkah kebijakan yang akan ditempuh dalam Tahun 2017. Selama kurun waktu kurang lebih 6 bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal maupun eksternal seiring dengan terjadinya perubahan kebijakan oleh Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian

baik dari sisi Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan. Dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, sehingga dengan terjadinya perubahan tersebut maka diperlukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017 terdiri atas : (1) Pendapatan Daerah; (2) Belanja Daerah; (3) Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka Struktur APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah, terdiri atas :
  - a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi : Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
  - b. Dana Perimbangan, meliputi : Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, serta Pendapatan Lainnya.
2. Belanja Daerah, terdiri atas :
  - a. Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik, serta Belanja Tidak Terduga.

- b. Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
3. Pembiayaan Daerah, terdiri atas :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah, meliputi : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, meliputi : Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah.

Secara ringkas Anggaran setelah perubahan dan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2017 (sebelum audit BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ) sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.25  
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Target / Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	Bertambah (Berkurang) ( Rp )	%
1.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.246.177.607.360,96</b>	<b>2.216.325.412.772,01</b>	<b>(29.852.194.588,95)</b>	<b>98,67</b>
2.	<b>BELANJA</b>	<b>2.312.594.105.345,78</b>	<b>2.238.086.980.060,80</b>	<b>(74.507.125.284,98)</b>	<b>96,78</b>
	Surplus/ ( Defisit )	(66.416.497.984,82)	(21.761.567.288,79)	44.654.930.696,03	32,76
3.	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
	a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	70.916.497.984,82	70.665.897.984,82	(250.600.000,00)	99,64
	b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.500.000.000,00	3.300.000.000,00	(1.200.000.000,00)	73,33
	Pembiayaan Netto	66.416.497.984,82	67.365.897.984,82	949.400.000,00	101,43
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	45.604.330.696,03	45.604.330.696,03	

Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Ponorogo (Data Un Audited BPK-RI)

#### b. Kinerja Pendapatan Daerah

Dalam konteks keuangan daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak-hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Dengan kata lain Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan

Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan publik yang optimal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kenaikan dan penurunan Pendapatan Daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah terutama sektor Pajak Daerah. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan dan ekstensifikasi dengan tetap memperhitungkan faktor kondusifitas iklim investasi dan penuh kehati-hatian karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/ Wajib Pajak golongan kecil menengah dan optimalisasi Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah yang dituangkan pada APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Merujuk pada konsep hak dan kewajiban dan menerapkannya pada pengelolaan keuangan daerah, maka pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017 yaitu :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal dilaksanakan dengan cara bijaksana, artinya bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak terlalu membebani masyarakat, tetapi sebaliknya dapat memberi gairah terhadap perekonomian masyarakat;
2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan lebih mengedepankan harmonisasi terhadap kenaikan pendapatan daerah yang berasal dari kelompok, jenis, maupun obyek pendapatan yang telah teridentifikasi;
3. Lebih banyak berkonsentrasi terhadap program-program yang dapat mendatangkan hasil pendapatan daerah (investasi) baik dalam jangka waktu dekat, menengah maupun panjang;
4. Meningkatkan penerimaan dari dana perimbangan melalui perencanaan dan penghitungan potensi yang terus berkembang.

Bertitik tolak dari Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo dalam Tahun Anggaran 2017 tersebut, maka Strategi Pendapatan Daerah dalam APBD antara lain :

1. Perbaiki pelayanan dan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela ;
2. Perbaiki kebijakan perpajakan untuk mendukung optimalisasi pendapatan Negara dan mendukung ekonomi, termasuk dengan pemberian insentif fiskal;
3. Pembenahan internal aparatur dan sistem perpajakan;
4. Penegakan hukum ( law enforcement ) kepada wajib pajak yang tidak patuh;
5. Mensinergikan unsur pemerintah dalam penggalian potensi perpajakan dengan memberikan dukungan data/ informasi kepada Kementerian Keuangan;
6. Upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan juga dilakukan melalui upaya perluasan tax base dengan penambahan jumlah wajib pajak yang didukung langkah kebijakan berupa pemberian NPWP secara jabatan disamping pemanfaatan teknologi (*re-engineering*) dalam menangani wajib pajak dan mengadakan program peningkatan kualitas aparatur pajak;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah;
9. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang potensial.

Berikut target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017.

Tabel 3.26  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo  
Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Target / Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	Bertambah (Berkurang) ( Rp )	%
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.246.177.607.360,96</b>	<b>2.216.325.412.772,01</b>	<b>(29.852.194.588,95)</b>	<b>98,67</b>
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	307.538.129.095,30	309.359.596.709,01	1.821.467.613,71	100,59

1.2	DANA PERIMBANGAN	1.487.395.460.700,00	1.433.075.787.760,00	(54.319.672.940,00)	96,35
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	451.244.017.565,66	473.890.028.303,00	22.646.010.737,34	105,02
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.246.177.607.360,96</b>	<b>2.216.325.412.772,01</b>	<b>(29.852.194.588,95)</b>	<b>98,67</b>

Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Ponorogo (Data Un Audited BPK-RI)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.216.325.412.772,01 atau 98,67% dari target /anggaran sebesar Rp. 2.246.177.607.360,96. Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2017 lebih rendah dari target anggaran yang ditetapkan, namun apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.026.630.853.798,86 mengalami peningkatan sebesar Rp. 189.694.558.973,15 atau 9,36%.

### c. Kinerja Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah merupakan strategi dan prioritas belanja daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. yang diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah serta pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada capaian hasil. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Anggaran Belanja Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal yaitu :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;

- Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;
- Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Oleh karena itu untuk dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, maka anggaran daerah sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan sudah selayaknya diarahkan seoptimal mungkin dengan penerapan efisiensi dan efektivitas dalam pengalokasiannya.

Dalam hal penetapan Anggaran Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah berupaya mengarahkan pengalokasian anggaran agar dari tahun ke tahun dapat lebih berpihak kepada kepentingan rakyat melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan Umum Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Belanja infrastruktur untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata dan berkeadilan serta mendukung terciptanya ketahanan pangan.
2. Penciptaan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran, melanjutkan program perlindungan sosial, diantaranya dalam bentuk : (i) Program Jamkesmas / Jamkesmasda; (ii) Program Keluarga Harapan ( PKH ); (iii) Infrastruktur pedesaan, daerah tertinggal dan khusus serta infrastruktur sosial ekonomi pedesaan; (iv) melaksanakan program BOS; (v) penyaluran dan pengamanan program Raskin.
3. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan pendekatan pencapaian output dan outcome.
4. Memperbaiki kesejahteraan aparatur pemerintah dan memperluas kebijakan reformasi birokrasi.
5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah antara lain melalui optimalisasi penyerapan anggaran belanja SKPD dengan diikuti upaya (a) perbaikan penyusunan perencanaan anggaran dan percepatan pelaksanaan anggaran SKPD, (b) penyelesaian proses penyusunan anggaran tepat waktu dan disiplin, baik dalam pembahasan intern pemerintah maupun dengan DPRD, (c) percepatan dan penyederhanaan proses pelaksanaan administrasi anggaran, (d) memanfaatkan mekanisme e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa, dan (e) perbaikan pola penyerapan anggaran yang lebih proporsional.
6. Mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD dan mengarahkan pemanfaatan anggarannya untuk meningkatkan aksesibilitas serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

7. Mengalokasikan anggaran bidang Kesehatan 10 persen dari APBN/APBD dan mengarahkan pemanfaatan anggarannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
8. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada desa sebagai bentuk amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 96 ayat 1 dan 2 bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan ADD setiap tahun paling sedikit sebesar 10 persen dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus.
9. Menyalurkan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
10. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.
11. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja dalam seluruh program, dengan tanpa mengurangi kinerja aparatur daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
12. Mengarahkan belanja kegiatan untuk mewujudkan program-program Pemerintah Daerah yang dinilai prioritas, sangat mendesak untuk segera direalisasikan dan sesuai dengan dokumen perencanaan daerah serta aspirasi masyarakat.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Kebijakan Umum Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2017, maka Strategi Belanja Daerah sebagai berikut :

1. Menyusun skala prioritas terhadap usulan program-program kegiatan dari setiap satuan kerja, yang didasarkan pada Renstra SKPD dan pemenuhan aspirasi masyarakat yang sudah mendesak segera direalisasikan.
2. Mendahulukan pemenuhan anggaran yang sifatnya wajib dan mengikat antara lain pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai, anggaran listrik, telepon dan kebutuhan wajib lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
3. Memangkas usulan-usulan belanja yang dinilai tidak realistis, yang disesuaikan dengan standar analisa belanja.
4. Sesuai dengan inti Sistem Anggaran Kinerja, maka penentuan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh tiap satuan kerja harus didasarkan pada relevan tidaknya dengan visi, misi dan tugas pokok serta fungsi tiap satuan kerja.

Berikut target dan relisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017.

Tabel 3.27

Target dan Realisasi Belanja Daerah  
Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Target	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%
2	BELANJA	2.312.594.105.345,78	2.238.086.980.060,14	(74.507.125.284,98)	96,78
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.384.340.277.886,39	1.351.399.609.990,14	(32.940.667.896,25)	97,62
2.2	BELANJA LANGSUNG	928.253.827.459,39	886.687.370.070,66	(41.566.457.388,73)	95,52
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.312.594.105.345,78</b>	<b>2.238.086.980.060,14</b>	<b>(74.507.125.284,98)</b>	<b>96,78</b>

*Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Ponorogo (Data Un Audited BPK-RI)*

**d. Analisis Rasio Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja**

Sesuai dengan PP 58 tahun 2005 pasal 4, Kinerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya adalah dalam bentuk analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai pada suatu periode dengan periode berikutnya sehingga dapat dilihat trend/kecenderungannya. Analisis rasio sangat berguna dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah, baik bagi kepala daerah maupun DPRD dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan rasio keuangan yang digunakan dalam laporan ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Kesenjangan, Rasio Pengelolaan Belanja dan Rasio Pertumbuhan.

**1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.**

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan sebaliknya. Adapun rumus dalam menghitung Rasio Kemandirian Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{PAD}}{(\text{Dana Perimbangan} + \text{Pinjaman Daerah})} \times 100\%$$

Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian daerah, dasar yang digunakan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.28  
Kriteria Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	>25 - 50	Konsultatif
Sedang	>50 - 75	Partisipatif
Tinggi	>75	Delegatif

Sumber data : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Tabel 3.29  
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2017

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Pinjaman Daerah	Rasio Kemandirian (%)
2012	108.766.406.815,21	918.491.008.709,00	-	11,84
2013	134.097.320.780,57	1.016.758.344.123,00	-	13,19
2014	198.730.421.479,94	1.099.675.841.581,00	-	18,07
2015	210.695.348.134,82	1.144.291.367.053,00	-	18,41
2016	240.111.321.573,88	1.455.939.797.771,00	-	16,49
2017	309.386.231.309,01	1.433.075.787.760,00	-	21,59

Sumber data : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012 – 2016 dan LRA TA. 2017 un-Audited

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo menunjukkan angka di bawah 25% (pola hubungan Instruktif). Hal ini menunjukkan peran pemerintah pusat masih dominan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Pola ini dari sisi finansial menunjukkan masih adanya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Walaupun demikian trend

perkembangan kemandirian daerah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

## 2. Rasio Efektifitas PAD

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Adapun rumus dalam menghitung Rasio Efektifitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD sesuai Potensi Riil}} \times 100\%$$

Untuk menilai tinggi rendahnya rasio efektifitas PAD, dasar yang digunakan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.30  
Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektifitas	Kemandirian
Sangat Efektif	> 100
Efektif	>90 - 100
Cukup Efektif	>80 - 90
Kurang Efektif	>60 - 80
Tidak Efektif	≤ 60

Sumber data : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Adapun perhitungan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Ponorogo dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.31  
Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Ponorogo  
Tahun Anggaran 2012-2017

Tahun	Target PAD	PAD	Rasio Efektivitas (%)
2012	108.766.406.815,21	90.298.649.156,74	120,45
2013	134.097.320.780,57	116.076.194.729,16	115,53
2014	198.730.421.479,94	166.946.342.772,16	119,04
2015	210.695.348.134,82	199.120.659.301,16	105,81
2016	240.111.321.573,88	223.153.364.741,00	107,60
2017	309.386.231.309,01	307.538.129.095,30	100,60

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012 – 2016 dan LRA TA. 2017 un-Audited

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Keefektifitasan PAD Pemerintah Kabupaten Ponorogo menunjukkan angka di atas 100%, artinya Pemerintah Kabupaten Ponorogo sangat efektif dalam pencapaian target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.

### 3. Rasio Keserasian/Aktivitas

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio yang dipergunakan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Aktivitas Belanja Operasi dan Rasio Aktivitas Belanja Modal.

- a. Rasio Aktivitas Belanja Operasi, merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

- b. Rasio Aktivitas Belanja Modal, merupakan perbandingan antara total Belanja Pembangunan/Fisik dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Modal. Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin besar pula investasi pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Aktivitas Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Pembangunan/Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas maka rasio keserasian Pemerintah Kabupaten Ponorogo disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.32  
Perhitungan Rasio Aktifitas (Keserasian) Belanja Operasional dan Belanja Modal Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2012-2017

Tahun	Belanja (Rp)		Total Pendapatan/APBD	Rasio Aktivitas (%)	
	Operasi	Modal		Operasi	Modal
2012	1.067.596.991.118,88	193.382.065.496,00	1.270.454.466.408,21	84,03	15,22
2013	1.281.781.796.279,00	110.848.141.315,00	1.452.191.618.348,57	88,27	7,63
2014	1.353.550.637.182,00	176.983.715.062,00	1.704.809.253.588,94	79,40	10,38
2015	1.359.824.885.940,86	376.402.638.867,00	1.866.869.447.087,82	72,84	20,16
2016	1.379.876.721.213,00	324.169.328.852,00	2.026.630.853.798,86	68,09	16,00
2017	1.763.257.263.741,27	465.255.813.618,53	2.216.352.047.372,01	79,56	20,99

Sumber data : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012 – 2016 dan LRA TA. 2017 un-Audited

Dari perhitungan rasio keserasian di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar dana Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih digunakan untuk belanja operasi. Paling besar pada tahun 2016 sebesar 88,27 dan paling rendah tahun 2016 sebesar 68,09% (rata-rata 78.70%), sedangkan porsi belanja modal rata-rata masih 15,06%. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih perlu menekan belanja operasinya dalam rangka menyediakan dana untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat serta pelayanan publik karena efek multiplier yang dihasilkan lebih besar daripada belanja operasi.

#### 4. Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio ini menggambarkan kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif, yaitu belanja daerah yang direncanakan idealnya tidak lebih besar dari pendapatan daerah yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau defisit anggaran, yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan. Penghitungan secara pasti besaran surplus atau defisit anggaran pada suatu pemerintah daerah sulit untuk ditentukan karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, faktor antara lain:

- a. Keterlambatan penetapan besaran alokasi Anggaran Dana Perimbangan;
- b. Adanya program kegiatan yang dibiayai dari APBN pada SKPD yang memerlukan dana pendamping dari APBD dan penyusunannya tidak melibatkan pemerintah daerah;
- c. Penerimaan pendapatan daerah tidak sebanding dengan belanja daerah

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.33  
Surplus/Defisit Anggaran dan Perhitungan Rasio Pengelolaan Belanja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2012-2017

Tahun	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Rasio Pengelolaan Belanja
2012	1.265.059.005.035,88	1.270.454.466.408,21	100,43
2013	1.396.914.654.794,00	1.452.191.618.348,57	103,96
2014	1.626.511.374.280,00	1.704.809.253.588,94	104,81
2015	1.688.021.600.792,86	1.866.869.447.087,82	110,60
2016	1.765.262.480.445,90	2.026.630.853.798,86	114,81
2017	2.238.087.006.060,80	2.216.352.047.372,01	99,03

*Sumber data : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012 – 2016 dan LRA TA. 2017 un-Audited*

Rasio pengelolaan belanja Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan. Namun dapat dilihat pula pada tahun 2017 mengalami defisit anggaran 99,03 % hal ini disebabkan meskipun ada kenaikan pendapatan tetapi disertai kenaikan realisasi belanja yang melebihi pendapatan daerah.

## 5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan, mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran , dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap potensi-potensi penerimaan dan prioritas belanja pada tahun-tahun mendatang, dalam arti lain mengukur kemampuan pemerintah Daerah dalam mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode. Jika pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber

pendapatan dan pengeluaran sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Rasio pertumbuhan :

a. Realisasi Penerimaan PAD =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD Xn-Xn-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD Xn-1}}$$

b. Rasio Pertumbuhan  $\Sigma$  Pendapatan =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{ Pendapatan Xn-Xn-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } \Sigma \text{ Pendapatan Xn-1}}$$

c. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi =

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran } \Sigma \text{ Belanja Operasi Xn-Xn-1}}{\text{Pengeluaran } \Sigma \text{ Belanja Operasi Xn-1}}$$

d. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran } \Sigma \text{ Belanja Modal Xn-Xn-1}}{\text{Pengeluaran } \Sigma \text{ Belanja Modal Xn-1}}$$

Tabel 3.34

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Ponorogo  
Tahun Anggaran 2012-2017

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
PAD	108.766.406.815,21	134.097.320.780,57	198.730.421.479,94	210.695.348.134,82	240.111.321.573,88	309.386.231.309,01	
Rasio Pertumbuhan PAD	0%	23%	48%	6%	13%	28%	23,60%
Total pendapatan	1.270.454.466.408,21	1.452.191.618.348,57	1.704.809.253.588,94	1.866.869.447.087,82	2.026.630.853.798,86	2.216.352.047.372,01	
Rasio Pertumbuhan pendapatan	0%	14%	17%	9%	8%	9%	11,40%
Belanja Operasi	1.067.596.991.118,88	1.281.781.796.279,00	1.353.550.637.182,00	1.359.824.885.940,86	1.379.876.721.213,00	1.763.257.263.741,27	
Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi	0%	20%	5%	0,46%	1,47%	27%	5,38%
Belanja Modal	193.382.065.496,00	110.848.141.315,00	176.983.715.062,00	376.402.638.867,00	324.169.328.852,00	465.255.813.618,53	
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	0%	(42%)	59%	112,67%	(13,87)	43,52%	31,86%

Sumber data : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012 – 2016 dan LRA TA. 2017 un-Audited

Rasio pertumbuhan PAD pemerintah kabupaten Ponorogo dari tahun 2013-2017 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Rata-rata rasio pertumbuhan PAD selama 5 tahun sebesar 23,60% menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan namun 2 tahun berikutnya mengalami kenaikan.

Pertumbuhan pendapatan pemerintah kabupaten Ponorogo rata-rata sebesar 11,40%. Rasio belanja operasi rata-rata selama 5 tahun sebesar 5%. Rasio belanja modal rata-rata sebesar 31,86%. Berdasarkan tabel di atas rasio pertumbuhan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan baik.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Keterbatasan ketersediaan data, terutama data-data yang seharusnya disediakan pihak luar Pemerintah Kabupaten Ponorogo, namun ternyata sampai dengan disusunnya laporan ini data tersebut masih belum tersedia menyebabkan pengukuran capaian kinerja belum bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga tidak dapat dilaporkan keberhasilan ataupun kegagalan masing-masing sasaran dan tujuan pada masing-masing misi.

Jumlah sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) misi, 20 (dua puluh) sasaran dan 33 (tiga puluh tiga) indikator sasaran. Sasaran tersebut dicapai melalui program dan kegiatan yang terencana dan dibiayai menggunakan APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2017. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran tahun 2017 sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja atau 30,30 % kriteria **Sangat Baik**, 22 (dua puluh dua) indikator kinerja atau 66,67 % kriteria **Baik**, 1 (satu) indikator kinerja atau 3,03 % tidak mencapai target. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

### **B. SARAN**

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain :

1. Dibutuhkan komitmen yang kuat seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan pentingnya SAKIP, adanya kebijakan yang memudah penerapan SAKIP, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar tercipta kejelasan arah penerapan SAKIP yang baik dan benar sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

2. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, serta penyelarasan dengan program Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Perubahan paradigma aparat Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.

Ponorogo, 19 Maret 2018  
**BUPATI PONOROGO**



*[Handwritten signature in blue ink]*  
**Drs. H. IPONG MUCHLISSONI**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## FORMULASI PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA / RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Pertumbuhan Ekonomi	$R = \{ (P_t / P_{t-1}) - 1 \} \times 100$ Keterangan :    r    : Pertumbuhan Ekonomi P <sub>t</sub> : PDRB Tahun ke-t (Harga Konstan) P <sub>t-1</sub> : PDRB Tahun sebelumnya (Harga Konstan)	Badan Pusat Statistik
Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	Badan Pusat Statistik
Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja yang belum bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja
Nilai Tukar Petani	Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (I <sub>t</sub> ) dengan indeks harga yang dibayar petani (I <sub>b</sub> ).	BAPPEDA LITBANG
Indeks Pembangunan Manusia	Total jumlah indeks harapan hidup + rata-rata lama sekolah + standar hidup layak dibagi 3 kemudian dikalikan 100%.	Badan Pusat Statistik
Indeks Gini	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Keterangan :    GR    : Indeks Gini F <sub>i</sub> : jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i Y <sub>i</sub> : jumlah komulatif (%) pendapatan pada kelas ke i	BAPPEDA LITBANG
Infrastruktur Publik Dalam Keadaan baik.		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Opini BPK	Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (LKPD).	BPPKAD

**MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2016 – 2021**

**Misi 1 : Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah.**

Tujuan 1.1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			
Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2021
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi	NA	73

Sasaran 1.1.1 Terwujudnya pelayanan prima.												
Indikator		Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
1	IKM	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat Unit Pelayanan.	77,51	78	79	79	80	80	81	1. Pendekatan pelayanan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat 3. Penerbitan dokumen kependudukan lengkap 4. Pelaksanaan kerjasama pelayanan berbasis IT (on line) 5. Pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah / Lembaga Terkait 6. Pembangunan database kependudukan 7. Percepatan pelayanan	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2. Penataan Administrasi kependudukan 3. Pelayanan pencatatan sipil 4. Pelayanan pendaftaran penduduk 5. Kependudukan Kabupaten 6. Penyusunan Profil Administrator kependudukan 7. Pengelolaan Informasi dan dokumentasi 8. Program pengadaan , peningkatan sarana dan prasarana RSUD 9. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah RSUD Dr. Harjono Bagian Organisasi Kecamatan

											<p>10. Program kerjasama dengan RS lain dalam mencukupi kebutuhan dokter spesialis sesuai standart yg ditetapkan</p> <p>11. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</p> <p>12. Perbaikan sistem administrasi kearsipan</p> <p>13. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

**Sasaran 1.1.2**

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab	
1	Nilai SAKIP.	Hasil Penilaian SAKIP dari Kemenpan RB	CC	B	BB	BB	A	A	A	<p>Peningkatan kinerja aparatur.</p> <p>Peningkatan system pengawasan dan pengendalian internal.</p>	<p>1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> <p>2. Program pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan</p>	<p>Subag Penyusunan Program dan Pelaporan BAPPEDA LITBANG</p> <p>Subag Perencanaan Inspektorat</p> <p>Subag Peningkatan Kinerja Bagian Organisasi</p>
2	Nilai LPPD	Hasil penilaian EKPPD dari Kementerian Dalam Negeri.	T	T	T	T	ST	ST	ST	<p>Peningkatan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>	<p>1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH</p> <p>2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p>	<p>Bagian Administrasi Pemerintahan Umum</p>

3	Opini BPK	Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah.	WTP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas sistem kebijakan terkait pengelolaan keuangan dan asset daerah.</li> <li>2. Peningkatan sistem pengendalian intern (SPI).</li> <li>3. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas APIP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota</li> <li>7. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</li> </ol>	Subag Perencanaan Inspektorat Bidang Akuntansi BPPKAD						
---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

**Sasaran 1.1.3.**

Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab	
1.	Rasio PAD terhadap total pendapatan	(Jumlah Realisasi PAD tahun berkenaan/ Jumlah Total Pendapatan tahun berkenaan) X 100%	11,29%	11,30%	11,32%	11,34%	11,36%	11,37%	11,40%	Peningkatan kualitas kebijakan dan pengembangan pendapatan asli daerah	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi BPPKAD

**Sasaran 1.1.4.**

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.

Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
1 Indeks Desa Membangun	$IDM = 1/3 ( IS + IEK + IL )$  Dimans : IS = Indeks Sosial IEK = Indeks Ekonomi IL = Indeks Lingkungan (Ekologi)	-	0,4076	0,7154	0,7459	0,7759	0,8061	0,8461	1. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. 2. Penataan Tata kelola pemerintahan Desa	1. Program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa  2. Program Penyelenggaraan penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Misi 2 : Mengelola Sumber Daya Daerah Lebih Berdaya Guna, Unggul, Produktif, berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industry, perdagangan dan pengembangan pariwisata sebagai lokomotif penggerak perekonomian daerah**

<b>Tujuan 2.1.</b>			
Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Potensi Daerah			
<b>Indikator</b>	<b>Formula / Penghitungan</b>	<b>Kondisi 2015</b>	<b>Target 2021</b>
1. Pertumbuhan Ekonomi	(Jumlah usaha mikro tahun N – Jumlah usaha mikro tahun N-1) / Jumlah usaha mikro tahun N-1 x 100%	5,27	6,17
2. Index GINI (Ketimpangan Wilayah)	Formula GINI RATIO $GR=1-\sum Pi(Fi+Fi-1)$	0,29	0,25

<b>Sasaran 2.1.1.</b>											
Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Sektor Koperasi dan Usaha Mikro											
<b>Indikator</b>	<b>Formula / Penghitungan</b>	<b>Kondisi 2015</b>	<b>Target 2016</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Strategi Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1	% Pertumbuhan Usaha Mikro (Jumlah usaha mikro tahun N – Jumlah usaha mikro tahun N-1) / Jumlah usaha mikro tahun N-1 x 100%	1,80	1,82	1,83	1,84	1,85	1,87	1,90	1. Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dikalangan masyarakat; 2. Meningkatkan pembinaan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat; 3. Meningkatkan promosi produk unggulan daerah yang diperdagangkan di pasar domestik, meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri, serta meningkatkan tingkat kesadaran produsen untuk	1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil; 3. Program pemberdayaan skala mikro; 4. Program Pembinaan lingkungan sosial; 5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

**Sasaran 2.1.1.**

Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Sektor Koperasi dan Usaha Mikro

Indikator		Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
										menggunakan kandungan lokal yang lebih tinggi	6. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	
2	% Koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat / Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian x dikalikan 100%	11,67	13,00	15,00	18,00	20,00	20,00	22,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan yang melibatkan OPD terkait, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan Gerakan Koperasi</li> <li>2. Pembentukan lembaga pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Mikro</li> <li>3. Penilaian kesehatan koperasi secara bertahap;</li> <li>4. Fasilitasi pembentukan koperasi baru dan status Badan Hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil;</li> <li>2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;</li> <li>3. Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi;</li> </ol>	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

**Sasaran 2.1.2.**

Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan.

Indikator		Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
1	% Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	(Jumlah IKM tahun N – Jumlah usaha mikro tahun N-1) / Jumlah IKM tahun N-1 x 100%	0,20	0,20	0,22	0,25	0,27	0,30	0,33	1. Mengoptimalkan kapasitas industri yang ada dan mengembangkan potensi baru melalui pengembangan produk unggulan daerah; 2. Fasilitasi bagi sentra-sentra IKM	1. Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri 2. Program Peningkatan Standarisasi Industri 3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 4. Program Penataan Struktur Industri 5. Program Pengembangan Lingkungan Industri Kecil	Bidang Industri Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2.	% PDRB Sektor Perdagangan	Jumlah PDRB sektor perdagangan	16,15	16,40	16,75	16,85	16,95	17,05	17,15	1. Peningkatkan perlindungan konsumen; 2. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan 3. Pengembangan potensi kearifan local melalui pendirian dan pengembangan UMKM berbasis potensi local dengan konsep “One Village One Product” untuk	1. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 2. Program Pengawasan Tata Niaga Pupuk dan Pestisida 3. Program Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Startegis 4. Program	Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

**Sasaran 2.1.2.**

Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan.

Indikator		Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
										mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5. Program Penyelenggaraan Promosi Dagang 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Import 7. Program Revitalisasi Pusat Perdagangan 8. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	
3.	% PDRB Sektor Industri	Jumlah PDRB sektor industri	6,74	6,85	6,95	7,00	7,05	7,10	7,15	1. Peningkatan kapasitas industri dan mengembangkan potensi baru melalui pengembangan produk unggulan daerah; 2. Fasilitasi dan pengembangan sentra IKM	1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri 3. Program Peningkatan Standarisasi Industri 4. Program Penataan Struktur Industri 5. Program Pengembangan Lingkungan	Bidang Industri Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

**Sasaran 2.1.2.**

Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan.

Indikator		Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
											6. Industri Kecil Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 7. Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam	

**Sasaran 2.1.3.**

Optimalisasi Sektor Pariwisata

Indikator		Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
1.	Jumlah kunjungan wisata	Jumlah pengunjung wisata.	396.926	416.772	437.610	459.490	482.464	506.587	531.916	1. Pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata yang potensinya cukup besar dan beragam serta memiliki nilai jual yang cukup tinggi. 2. Pembangunan museum reog sebagai salah satu upaya pelestarian seni budaya reog 3. Sertifikasi Keahlian Reog dengan melakukan	1. Program Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 3. Program Pengembangan Kemitraan	Bidang Pengembangan Produk dan Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata  Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata

Sasaran 2.1.3.											
Optimalisasi Sektor Pariwisata											
Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
									Standarisasi keahlian dan kompetensi keahlian olah seni reog. 4. Pemberdayaan dan pelestarian keragaman seni dan budaya yang ada di ponorogo. 5. Revitalisasi tempat-tempat bersejarah untuk melestarikan budaya yang ada		

Sasaran 2.1.4.												
Meningkatnya Iklim Investasi sebagai Pendorong Pengembangan Ekonomi Daerah												
Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab	
1	% Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	(Nilai investasi th n) - (nilai investasi th (n-1)) / Nilai Investasi th (n-1) x 100%	-	-	2	2	2	2	2	1. Meningkatkan kerjasama di bidang investasi antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah dan antara petani dan pengusaha 2. Melaksanakan pameran guna menarik investor	1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Bidang Penanaman Modal dan Kerjasama Dinas Penanaman Modal dan PTSP

**Misi 3 : Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktifitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.**

<b>Tujuan 3.1.</b>			
Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantab			
<b>Indikator</b>	<b>Formula / Penghitungan</b>	<b>Kondisi 2015</b>	<b>Target 2021</b>
Indeks Infrastruktur	% Infrastruktur publik dalam kondisi baik ditambah %Rumah Tangga yang Terlayani InfrastrukturDasar dibagi 2 (dua)	67%	76%

<b>Sasaran 3.1.1.</b>												
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.												
<b>Indikator</b>	<b>Formula / Penghitungan</b>	<b>Kondisi 2015</b>	<b>Target 2016</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Strategi Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	
1.	% Infrastruktur publik dalam kondisi baik.	Jumlah Infrastruktur sarana jalan, jembatan dan panjang irigasi dalam kondisi baik tahun n dibagi Jumlah Infrastruktur sarana jalan, jembatan dan panjang irigasi total tahun ke n dikali 100%	62	64	66	68	70	72	74	1. Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas saluran irigasi	1. Peningkatan jalan dan jembatan 2. Program pembangunan jalan dan jembatan 3. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 4. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya 5. Program pengendalian banjir	Bidang Bina Marga dan Bidang Sumber Daya Air Dinas PU dan PR
2.	% Rumah Tangga yang Terlayani Infrastruktur Dasar.	Jumlah rumah tinggal terlayani bersanitasi layak, rasio rumah layak huni, rumah tangga pengguna air bersih tahun n dibagi Jumlah rumah tinggal terlayani bersanitasi layak, rasio rumah layak huni, rumah tangga pengguna air bersih total tahun ke n dikali 100%	73	74	75	76	77	78	79	1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 2. SANIMAS (sanitasi berbasis masyarakat) 3. Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 4. Fisik bantuan stimulan perumahan stimulan (BSTS) 5. Pembangunan sarana dan pra sarana air bersih	1. Program lingkungan sehat perumahan 2. Program pengembangan perumahan 3. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**Sasaran 3.1.1.**

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

<b>Indikator</b>	<b>Formula / Penghitungan</b>	<b>Kondisi 2015</b>	<b>Target 2016</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Strategi Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
									6. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih . 7. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih . 8. PAMSIMAS(pembangunan air minum sanitas berbasis masyarakat)		

**Misi 4 : Membangun Pertanian Sebagai Pengembangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing Tangguh.**

<b>Tujuan 4.1.</b>			
Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang mantab dan berdaya saing			
Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2021
PDRB sektor pertanian	$\frac{\Sigma \text{ PDRB sektor Pertanian tahun berkenaan} - \Sigma \text{ PDRB sektor Pertanian tahun lalu}}{\Sigma \text{ PDRB sektor Pertanian tahun Lalu}} \times 100\%$	11,91	

<b>Sasaran 4.1.1.</b>												
Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani.												
Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab	
1	Nilai Tukar Petani	Perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib).	105,11	105,11	105,6	106,21	106,84	107,25	107,85	Meningkatkan ekonomi berbasis pertanian unggulan, perkebunan, kehutanan serta perikanan	1. Prog. Data / informasi / statistik daerah. 2. Program Peningkatan penerapan teknologi tepat guna. 3. Program Peningkatan kesejahteraan petani. 4. Prograam Peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan 5. Program Pengembangan pertanian organik 6. Prog. Peningkatan kualitas bahan baku. 7. Program Pengembangan agribisnis peternakan 8. Program Pengelolaan pelayanan Lab,	Dinas Pertanian dan Perikanan BAPPEDALITBANG

**Sasaran 4.1.1.**

Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani.

Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
2	% Pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		Puskeswan, RS Hewan 1. Program Peningkatan produksi Perkebunan. 2. Prog. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 3. Program Pengembangan budidaya perikanan. 4. Program Pengembangan perikanan tangkap. 5. Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 6. Program Peningkatan produksi pertanian 7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan

**Sasaran 4.1.2.**

Meningkatnya ketahanan pangan daerah.

Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
1	Angka kecukupan pangan utama.	142.870,3	147.920,3	152.970,4	158.020,4	163.070,5	168.120,5	173.170,6	Meningkatkan ekonomi berbasis pertanian unggulan, perkebunan, kehutanan serta	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan )	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan

**Sasaran 4.1.2.**

Meningkatnya ketahanan pangan daerah.

<b>Indikator</b>	<b>Formula / Penghitungan</b>	<b>Kondisi 2015</b>	<b>Target 2016</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Strategi Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
									perikanan.		

**Misi 5 : Menata Kawasan yang Nyaman Untuk Semua, dengan Ketersediaan Ruang Publik yang Memadai Berwawasan Lingkungan**

<b>Tujuan 5.1.</b>			
Mewujudkan kawasan yang nyaman bagi warga masyarakat			
<b>Indikator</b>	<b>Formula / Penghitungan</b>	<b>Kondisi 2015</b>	<b>Target 2021</b>
Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.	64,74	69,00

<b>Sasaran 5.1.1.</b>												
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat.												
<b>Indikator</b>	<b>Formula / Penghitungan</b>	<b>Kondisi 2015</b>	<b>Target 2016</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Strategi Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	
1	% Permukiman sehat.	% Pemukiman rumah tinggal bersanitasi layak, rumah layak huni dan rumah tangga pengguna air bersih dibagi jumlah seluruh rumah tangga diwilayah kabupaten ponorogo	74,21	74,60	74,95	75,67	76,78	77,09	78,57	1. Meningkatkan cakupan layanan air bersih/air minum 2. Meningkatkan cakupan layanan air limbah domestik	1. Program Lingkungan sehat Perumahan 2. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 3. Program Pembangunan Prasarana sanitasi 4. Program perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan (BJP)	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman

<b>Sasaran 5.1.2.</b>												
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.												
<b>Indikator</b>	<b>Formula / Penghitungan</b>	<b>Kondisi 2015</b>	<b>Target 2016</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Strategi Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	
1	Indeks kualitas air	IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi	64,740	64,740	65,284	65,828	66,372	66,916	67,460	1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	Indeks kualitas udara		95,440	95,440	95,984	96,528	97,072	97,616	98,160	2. Menurunkan dampak	Program perlindungan dan konservasi sumber daya	

**Sasaran 5.1.2.**

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Indikator		Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
3	Indeks tutupan lahan / tutupan vegetasi	lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu	48,060	48,060	48,604	49,148	49,692	50,236	50,780	pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan/usaha 3. Meningkatkan akses informasi LH dan juga kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 4. Meningkatkan upaya pemulihan kerusakan lingkungan dan lahan kritis serta pelestarian sumber mata air 5. Meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati 6. Meningkatkan fungsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTH KP) 7. Meningkatkan produksi hasil hutan dengan tetap memperhatikan fungsi pelestarian hutan 8. Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa hutan 9. Mengembangkan pemanfaatan Energi baru dan terbarukan (EBIT)	alam  Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	

**Misi 6 : Membangun Prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja, melindungi hak-hak masyarakat**

Tujuan 6.1. Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja serta penegakan hukum.			
Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2021
Angka kemiskinan	$(\sum \text{penduduk miskin} / (\sum \text{penduduk seluruh}) \times 100\%$	11,91	10,95

Sasaran 6.1.1. Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha											
Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
1	Angka pengangguran terbuka $(\sum \text{pengangguran}) / (\sum \text{Angkat an kerja}) \times 100\%$	7,69%	7,69 %	7,60 %	7,50 %	7,40 %	7,30 %	7,30 %	Didalam usaha untuk mencapai target tahun kedepan, Dinas Tenaga Kerja akan melaksanakan kegiatan yaitu : pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, informasi bursa tenaga kerja secara online, penyiapan tenaga kerja siap pakai	1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2. Peningkatan kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja

Sasaran 6.1.2. Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.											
Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
1.	% Penurunan PMKS $(\text{tahun lalu-tahun ini}) / \text{tahun lalu kali } 100 \%$	2	2	2	2	2	2	2	Mendorong terciptanya kesempatan berusaha.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial KUBE,KIS/BPJS,PKH,KKS,A SLUT,ASODK,ASISTENSI ANAK,PENANGANAN KORBAN BENCANA,REHABILITASI SOSIAL	DINAS Sosial, P3A

**Sasaran 6.1.3.**

Menurunnya pelanggaran Perda.

<b>Indikator</b>	<b>Formula / Penghitungan</b>	<b>Kondisi 2015</b>	<b>Target 2016</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Strategi Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	
1.	% Penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum <hr/> Jumlah kasus pelanggaran ketertiban dan ketentraman umum X 100%	NA	13	22	35	55	75	100	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undnagan.	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 2. Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja

**Misi 7 : Meningkatkan Peran Aktif Pemerintah Daerah dan Memajukan Sistem Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Guna Mendorong Kualitas SDM yang Handal, Mempunyai Kompetensi yang Cukup Membangun Jiwa Bangsa Melalui Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga, Yang Bertaqwa, Berbudaya dan Berkepribadian**

Tujuan 7.1.			
Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas			
Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2021
IPM	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	67,40	69,40

Sasaran 7.1.1.											
Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga											
Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
1. Rata-rata lama sekolah	<p>penjumlahan rasio umur tunggal yang bersekolah dibagi jumlah penduduk umur tunggal dari usia 7 th s.d tak terhingga</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	6,90	7,15	7,50	7,85	8,25	8,60	8,85	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjamin penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan non formal yang merata, dan berkelanjutan.</li> <li>Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.</li> <li>Program Pendidikan Non Formal.</li> </ol>	Dinas Pendidikan.
2. Angka harapan lama sekolah.	<p>penjumlahan lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas</p> <p>= Jumlah Penduduk usia 25 tahun keatas.</p> $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}}$	13,29	13,69	13,72	13,81	13,90	13,95	13,98	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan layanan pendidikan dasar dan pendidikan non formal</li> </ol>	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Dinas Pendidikan

Sasaran 7.1.1.																
Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga																
Indikator	Formula / Penghitungan						Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
														yang berkualitas. 2. Meningkatkan kualitas, kompetensi, kualifikasi dan profesionalisme tenaga pendidik. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.	2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP 3. Program Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini. 4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.	

Sasaran 7.1.2												
Meningkatnya derajat / status kesehatan masyarakat												
Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab	
1.	Usia Harapan Hidup	Rata rata semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu	72,08	72,14	72,39	72,64	72,89	73,14	73,14	1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, meningkatkan standart kualitas pelayanan puskesmas dan jaringannya, meningkatkan akses	1. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan. 2. Program perbaikan gizi masyarakat 3. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan. 4. Pencegahan dan	Dinas Kesehatan

**Sasaran 7.1.2**

Meningkatnya derajat / status kesehatan masyarakat

Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Taet 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
									<p>dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia serta kesehatan reproduksi.</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan lintas program dan lintas sektor serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penanganan permasalahan gizi masyarakat.</p> <p>3. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, meningkatkan standart kualitas pelayanan puskesmas dan jaringannya, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia serta kesehatan reproduksi.</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan lintas program dan lintas sektor serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penanganan</p>	<p>Penanggulangan Penyakit.</p> <p>5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.</p>	

**Sasaran 7.1.2**

Meningkatnya derajat / status kesehatan masyarakat

Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Taet 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
									permasalahan gizi masyarakat. 5. Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor serta swasta dalam pengendalian penyakit.		

**Tujuan 7.2**

Mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemuda dan perlindungan anak dan manula serta pemantapan KB

Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2021
Indeks Pembangunan Gender	$IPG = 1/3 [(X_{eds(1)} + X_{eds(2)} + I_{inc-dis})]$	62,82	63,42

**Sasaran 7.2.1.**

Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan dan Pengendalian Penduduk

Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
1. IDG	$1/3 (ipar + Idm + I_{ino-dis})$	62,82	62,96	63,10	63,24	63,51	63,55	63,65	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak di berbagai bidang.	1. Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 3. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  BAPPEDA LITBANG
2. % kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti.	$(\Sigma \text{Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditindaklanjuti}) / (\Sigma \text{Kasus Kekerasana Perempuan dan Anak yang dilaporkan}) \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya pencegahan, penanganan dan pendampingan tindak kekerasan perempuan dan anak.	1. Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. % Laju pertumbuhan penduduk.	Jumlah penambahan penduduk dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	1. Mengendalikan angka kelahiran total (TFR). 2. Meningkatkan ketahanan dan	1. Program Keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 2. Program Kesehatan reproduksi remaja	Bidang Pengendalian Penduduk, Bina Lini Lapangan dan Analisa Data Dinas PP dan KB

**Sasaran 7.2.1.**

Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan dan Pengendalian Penduduk

Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
	dalam pertengahan tahun dikalikan 100 %.								kesejahteraan keluarga.	3. Program Pelayanan kontrasepsi. 4. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri. 5. Program Advokasi Komunikasi informasi dan edukasi(KIE) pengendalian penduduk dan KB. 6. Program Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). 7. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. 8. Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga. 9. Program Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU)	

**Sasaran 7.2.2.**

Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.

Indikator	Formula / Penghitungan	Kondisi 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Strategi Kebijakan	Program	Penanggung Jawab
1. % Cabang olahraga yang berprestasi.	$(\Sigma \text{Organisasi Cabang Olahraga yang aktif}) / (\Sigma \text{Organisasi cabang olah raga yang terdaftar}) \times 100\%$	-	4,5	9	13,6	18,2	22,7	27,3	Peningkatan sarana prasarana olahraga dan pembinaan atlet usia dini.	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2. Program Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 3. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olah Raga
2. % Organisasi Kepemudaan yang berprestasi	$(\Sigma \text{Organisasi kepemudaan yang berprestasi}) / (\Sigma \text{Organisasi kepemudaan yang terdaftar}) \times 100\%$	-	5	10	14,3	18,2	21,7	25	Peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda.	1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olah Raga



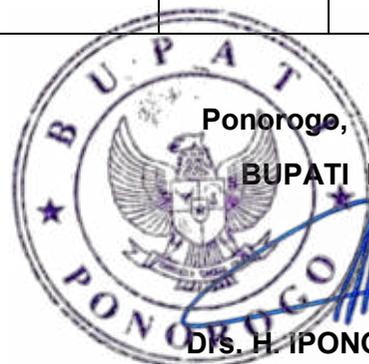
## PENGUKURAN KINERJA

Kabupaten : Ponorogo

Tahun : 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya pelayanan prima.	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	79	74,78	94,66
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja	1 Nilai SAKIP	BB	B	Belum tercapai
		2 Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi*	Tercapai
		3 Opini BPK	WTP	WTP*	Tercapai
3	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.	1 Rasio PAD terhadap total pendapatan.	11,32 %	13,96 %	123,32
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa.	1 Indeks Desa Membangun	0,7154	0,7154	100
5	Meningkatnya potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro.	1 Persentase pertumbuhan usaha mikro.	1,83	1,41	77,05
		2 Persentase koperasi sehat.	15	40	266,67
6	Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan.	1 Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah.	0,22	0,20	90,91
		2 Persentase PDRB sektor perdagangan	16,75	16,63**	99,28
		3 Persentase PDRB sektor industri	6,95	6,71 **	96,55
7	Optimalisasi sektor pariwisata.	1 Jumlah kunjungan wisata	437.610	336.710	76,94
8	Meningkatkan iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah.	1 Persentase pertumbuhan nilai investasi PMDN	2	2,04	102
9	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.	1 Persentase infrastruktur publik dalam kondisi baik.	66	64,11	97,14
		2 Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur dasar.	75	75,10	100,13
10	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani.	1 Nilai Tukar Petani	105,6	106,81	101,15
		2 Persentase pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan	2,5	3,1*	124,00
11	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	1 Angka kecukupan pangan utama	152.970,4	133.689,9 9	87,40

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	
12	Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman sehat.	1	Persentase permukiman sehat.	74,95	73,23	97,71
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Air	65,284	64,17	98,29
			Indeks Kualitas Udara	95,984	86,05	89,65
			Indeks Tutupan Lahan	48,604	64,14	131,96
14	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.	1	Angka pengangguran terbuka	7,60 %	3,5 %	153,95
15	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	1	Persentase penurunan PMKS	2	45,85	2.092,50
16	Menurunnya pelanggaran Perda	1	Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	22	18	81,82
17	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga.	1	Rata-rata lama sekolah	7,50	6,99	93,20
		2	Angka harapan lama sekolah	13,72	13,72	100
18	Meningkatkan derajat / status kesehatan masyarakat.	1	Usia Harapan Hidup	72,39	72,29*	99,86
19	Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk.	1	IDG	63,10	63,08	99,97
		2	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti.	100	100	100
		3	Presentase laju pertumbuhan penduduk.	0,20	0,18	110
20	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.	1	Persentase Cabang olahraga yang berprestasi.	9	9	100
		2	Persentase Organisasi kepemudaan yang berprestasi.	10	10	100



Ponorogo, 19 Maret 2018

BUPATI PONOROGO

Dis. H. IPONG MUCHLISSONI



**BUPATI PONOROGO**

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. IPONG MUCHLISSONI  
Jabatan : BUPATI PONOROGO

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ponorogo, 4 Desember 2017

**BUPATI PONOROGO**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'I' followed by a series of vertical and horizontal strokes.

**Drs. H. IPONG MUCHLISSONI**

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
KABUPATEN PONOROGO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja		Target
1	Terwujudnya Pelayanan Prima.	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	79
2	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja.	1	Nilai SAKIP	BB
		2	Nilai LPPD	Tinggi
		3	Opini BPK	WTP
3	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.	1	Rasio PAD terhadap total pendapatan	11,32 %
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.	1	Indeks Desa Membangun	0,7154
5	Meningkatkan potensi dan daya saing sektor koperasi dan usaha mikro.	1	% Pertumbuhan usaha mikro.	1,83
		2	% Koperasi sehat.	15,00
6	Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan.	1	% Pertumbuhan industri kecil dan menengah.	0,22
		2	% PDRB sektor perdagangan.	16,75
		3	% PDRB sektor industri.	6,95
7	Optimalisasi sektor pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisata	437.610
8	Meningkatnya iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah.	1	% Pertumbuhan nilai investasi PMDN.	2
9	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.	1	% Infrastruktur publik dalam kondisi baik..	66
		2	% Rumah tangga yang terlayani infrastruktur dasar.	75
10	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta kesejahteraan petani.	1	Nilai tukar petani.	105,6
		2	% Pertumbuhan nilai PDRB kategori pertanian dan perikanan.	2,5
11	Meningkatnya ketahanan pangan daerah.	1	Angka kecukupan pangan utama.	152.970,4
12	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemukiman sehat.	1	% Permukiman sehat.	74,95
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	1	Indeks kualitas air.	65,284
		2	Indeks kualitas udara.	95,984
		3	Indeks tutupan lahan	48,604
14	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.	1	Angka pengangguran terbuka.	7,60 %
15	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.	1	% Penurunan PMKS.	2
16	Menurunnya pelanggaran Perda.	1	% Penanganan kasus pelanggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat.	22

17	Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga.	1	Rata-rata lama Sekolah.	7,50
		2	Angka harapan lama sekolah	13,72
18	Meningkatnya derajat / status kesehatan masyarakat.	1	Usia harapan hidup.	72,39
19	Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dan pengendalian penduduk.	1	IDG	63,10
		2	% Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti.	100
		3	% Laju pertumbuhan penduduk.	0,20
20	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga.	1	% Cabang olahraga yang berprestasi.	9
		2	% Organisasi kepemudaan yang berprestasi.	10

### PROGRAM

### ANGGARAN

1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	47.515.768.183,00
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp.	23.950.838.813,24
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp.	3.432.443.696,00
4.	Peningkatan disiplin aparatur	Rp.	2.660.482.750,00
5.	Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp.	4.630.204.650,00
6.	Pendidikan anak usia dini	Rp.	323.000.000,00
7.	Pengembangan nilai budaya	Rp.	526.913.600,00
8.	Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Rp.	28.539.820.100,00
9.	Pendidikan non formal	Rp.	83.234.000,00
10.	Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Rp.	477.350.000,00
11.	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rp.	608.771.400,00
12.	Manajemen pelayanan pendidikan	Rp.	233.105.000,00
13.	BOS satuan pendidikan SMP negeri	Rp.	21.507.999.545,86
14.	BOS satuan pendidikan SD negeri	Rp.	45.997.599.999,00
15.	Obat dan perbekalan kesehatan	Rp.	221.712.500,00
16.	Upaya kesehatan masyarakat	Rp.	17.465.263.116,00
17.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Rp.	977.000.000,00
18.	Perbaikan gizi masyarakat	Rp.	240.191.000,00
19.	Pengembangan lingkungan sehat	Rp.	347.710.370,00
20.	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Rp.	1.057.545.500,00
21.	Standarisasi pelayanan kesehatan	Rp.	5.576.952.000,00
22.	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rp.	9.409.700.188,00
23.	Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rp.	1.058.000.000,00
24.	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Rp.	30.000.000,00
25.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Rp.	146.724.191.929,00
26.	Peningkatan mutu dan pelayanan BLUD Akper	Rp.	3.219.330.981,00
27.	Pembinaan lingkungan sosial	Rp.	19.462.013.511,00
28.	Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan	Rp.	20.980.000,00

29. Kefarmasian, alat kesehatan dan pengamanan makanan	Rp.	8.989.520.000,00
30. Peningkatan jalan dan jembatan	Rp.	399.189.000,00
31. Pembangunan jalan dan jembatan	Rp.	105.016.503.407,00
32. Pengembangan perumahan	Rp.	15.471.140.000,00
33. Lingkungan sehat perumahan	Rp.	3.634.000.000,00
34. Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Rp.	41.552.483.000,00
35. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp.	145.988.891.509,00
36. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rp.	26.113.187.825,00
37. Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Rp.	300.000.000,00
38. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rp.	250.000.000,00
39. Pengendalian banjir	Rp.	590.000.000,00
40. Pembangunan infrastruktur perdesaan / perkotaan	Rp.	1.019.528.200,00
41. Pengaturan jasa konstruksi	Rp.	95.420.000,00
42. Pemberdayaan jasa konstruksi	Rp.	184.580.000,00
43. Pengawasan jasa konstruksi	Rp.	40.000.000,00
44. Pemanfaatan ruang	Rp.	100.000.000,00
45. Pengendalian pemanfaatan ruang	Rp.	50.000.000,00
46. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Rp.	3.994.000.000,00
47. Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp.	47.080.000,00
48. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Rp.	37.250.000,00
49. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp.	616.520.000,00
50. Pendidikan politik masyarakat	Rp.	226.000.000,00
51. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp.	507.170.000,00
52. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp.	294.805.000,00
53. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rp.	39.900.000,00
54. Pengelolaan keragaman budaya	Rp.	2.682.960.000,00
55. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp.	615.614.500,00
56. Kedaruratan dan logistik	Rp.	147.202.000,00
57. Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana	Rp.	10.000.000.000,00
58. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Rp.	81.500.000,00
59. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya.	Rp.	45.000.000,00
60. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Rp.	191.750.000,00
61. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Rp.	81.075.000,00
62. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Rp.	105.700.000,00
63. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rp.	48,125.000,00
64. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Rp.	97.400.000,00

65.	Pembinaan eks penyandang penyakit social (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Rp.	11.575.000,00
66.	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social	Rp.	3.157.570.500,00
67.	Pemberdayaan sosial	Rp.	6.000.000,00
68.	Bantuan dan perlindungan sosial	Rp.	207.403.500,00
69.	Penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Rp.	50.000.000,00
70.	Penanggulangan pasca bencana	Rp.	207.000.000,00
71.	Pengembangan wilayah transmigrasi	Rp.	88.260.000,00
72.	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Rp.	231.000.500,00
73.	Peningkatan kesempatan kerja	Rp.	125.750.245,00
74.	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Rp.	219.960.000,00
75.	Pengembangan hubungan industrial dan syarat kerja	Rp.	51.080.000,00
76.	Peningkatan ketahanan pangan ( pertanian / perkebunan)	Rp.	7.248.708.500,00
77.	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Rp.	3.189.720.050,00
78.	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Rp.	77.750.000,00
79.	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Rp.	264.361.000,00
80.	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Rp.	18.200.000,00
81.	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rp.	1.454.315.000,00
82.	Penataan administrasi kependudukan	Rp.	555.500.900,00
83.	Pelayanan pencatatan sipil	Rp.	374.607.750,00
84.	Pelayanan pendaftaran penduduk	Rp.	1.905.869.650,00
85.	Penyusunan profil kependudukan kabupaten	Rp.	349.269.500,00
86.	Pengelolaan informasi dan dokumentasi	Rp.	15.460.000,00
87.	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Rp.	219.336.201,00
88.	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp.	42.000.000,00
89.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rp.	1.951.900.000,00
90.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Rp.	132.006.000,00
91.	Penyelenggaraan penataan desa	Rp.	631.564.000,00
92.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Rp.	200.000.000,00
93.	Keluarga berencana dna keluarga sejahtera	Rp.	268.305.000,00
94.	Kesehatan reproduksi remaja	Rp.	96.250.000,00
95.	Pelayanan kontrasepsi	Rp.	199.520.000,00
96.	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Rp.	156.490.000,00
97.	Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Rp.	5.250.000,00
98.	Advokasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB	Rp.	34.720.000,00
99.	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp.	842.955.000,00
100.	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Rp.	515.800.000,00
101.	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Rp.	1.014.776.000,00
102.	Peningkatan pelayanan angkutan	Rp.	1.616.612.000,00

103. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Rp.	569.000.000,00
104. Pengembangan data / informasi / statistic daerah	Rp.	687.303.000,00
105. Pengembangan komunitas, informai dan media massa	Rp.	2.739.313.000,00
106. Penyelenggaraan persandian	Rp.	116.867.000,00
107. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Rp.	149.775.000,00
108. Kerjasama informasi dengan mass media	Rp.	274.550.000,00
109. Kualitas pelayanan informasi media penyiaran	Rp.	4.600.000,00
110. Pengelolaan informasi dan komunikasi	Rp.	30.000.000,00
111. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp.	3.398.209.500,00
112. Peningkatan kualitas layanan informasi	Rp.	151.200.000,00
113. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Rp.	150.000000,00
114. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp.	55.000.000,00
115. Pengembangan industri kecil dan menengah	Rp.	380.941.000,00
116. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Rp.	230.085.000,00
117. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro mikro kecil menengah	Rp.	203.000.000,00
118. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp.	17.494.887.000,00
119. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Rp.	136.600.000,00
120. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Rp.	657.626.300,00
121. Pemberantasan barang kena cukai ilegal	Rp.	70.000.000,00
122. Pengawasan tata niaga pupuk dan pestisida	Rp.	25.000.000,00
123. Pengembangan lingkungan industry kecil	Rp.	10.887.059.000,00
124. Penyelenggaraan promosi dagang	Rp.	242.000.000,00
125. Peningkatan kualitas bahan baku	Rp.	3.710.000.000,00
126. Revitalisasi pusat perdagangan	Rp.	1.343.840.000,00
127. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Rp.	115.548.000,00
128. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Rp.	39.600.000,00
129. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp.	524.737.000,00
130. Pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu	Rp.	173.630.000,00
131. Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Rp.	288.020.500,00
132. Peningkatan peran serta kepemudaan	Rp.	217.665.000,,00
133. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Rp.	15.000.000,00
134. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	Rp.	30.000.000,00
135. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga	Rp.	25.000.0000,00
136. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		166.270.000,00
137. Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Rp.	172.700.000,00
138. Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah	Rp.	60.000.000,00
139. Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Rp.	141.750.000,00
140. Pengembangan pemasaran pariwisata	Rp.	1.365.900.000,00
141. Pengelolaan kekayaan budaya	Rp.	1.722.470.000,00
142. Pengembangan destinasi pariwisata	Rp.	418.800.000,00
143. Pengembangan kemitraan	Rp.	165.500.000,00

144. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Rp.	341.700.000,00
145. Pemanfaatan potensi sumber daya alam	Rp.	352.930.000,00
146. Peningkatan kesejahteraan petani	Rp.	71.038.500,00
147. Rehabilitasi hutan dan lahan	Rp.	4.300.000,00
148. Peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan	Rp.	5.761.350.000,00
149. Peningkatan produksi pertanian	Rp.	72.450.000,00
150. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Rp.	196.974.650.000
151. Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp.	126.710.000,00
152. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp.	47.635.000,00
153. Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp.	9.050.000,00
154. Pengembangan sistem Penyuluhan Perikanan	Rp.	107.790.000,00
155. Pengembangan produksi perkebunan	Rp.	58.875.000,00
156. Pengembangan agribisnis peternakan	Rp.	176.525.000,00
157. Pengelolaan pelayanan laboratorium, poskeswan, rumah sakit hewan dan rumah potong hewan	Rp.	439.120.200,00
158. Pengembangan pertanian organik	Rp.	26.892.455.300,00
159. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp.	35.000.000,00
160. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Rp.	1.322.752.500,00
161. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota	Rp.	595.283.000,00
162. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Rp.	58.893.000,00
163. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Rp.	876.057.000,00
164. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.	1.112.600.000,00
165. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi laut dan hutan	Rp.	64.956.000,00
166. Perencanaan pembangunan daerah	Rp.	3.246.703.000,00
167. Perencanaan pembangunan ekonomi	Rp.	271.701.000,00
168. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Rp.	190.000.000,00
169. Peningkatan produksi peternakan	Rp.	179.275.000,00
170. Penataan peraturan perundang-undangan	Rp.	990.400.000,00
171. Penataan daerah otonom baru	Rp.	138.923.000,00
172. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan	Rp.	396.080.215,00
173. Pembinaan dan pengembangan aparatur	Rp.	1.597.507.300,00
174. Pendidikan kedinasan	Rp.	473.224.950,00
175. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Rp.	18.412.546.664,00
176. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp.	11.884.415.206,30
177. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Rp.	974.375.449,00
178. Pembinaan dan peningkatan pemerintah kabupaten / kecamatan / desa	Rp.	5.977.984.655,00

179. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Rp.	943.400.000,00
180. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Rp.	52.680.000,00
181. Pencegahan korupsi	Rp.	254.600.000,00
182. Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja	Rp.	90.000.000,00
183. Pengembangan data / informasi	Rp.	2.920.450.000,00
184. Kerjasama pembangunan	Rp.	163.850.000,00
185. Perencanaan social dan budaya	Rp.	661.800.000,00
186. Penelitian dan pengembangan pelaksanaan pembangunan	Rp.	200.000.000,00
187. Penelitian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan	Rp.	440.000.000,00
188. Penelitian dan pengembangan rencana pembangunan	Rp.	180.000.000,00
189. Fasilitasi pindah / purna tugas PNS	Rp.	50.000.000,00
190. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS paru-paru/RS mata	Rp.	5.424.626.000,00
191. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp.	376.930.000,00
<b>JUMLAH</b>	Rp.	<b>928.253.827.459,39</b>

Ponorogo, 4 Desember 2017

**BUPATI PONOROGO**



**Drs. H. IPONG MUCHLISSONI**

## PIAGAM PENGHARGAAN TAHUN 2017

Berbagai prestasi dengan anugrah penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Piagam penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan capaian Standart Tertinggi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Piagam penghargaan “SWASTI SABA WIWERDA” diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten / Kota Sehat Tahun 2017 untuk Klasifikasi Pembinaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
3. Piagam penghargaan diberikan kepada Bupati Ponorogo untuk Percepatan Cakupan Pemberian Akta Kelahiran Anak Tahun 2017 kategori PRATAMA dari Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
4. Piagam penghargaan diberikan kepada Desa Singkil Kecamatan Balong atas prestasinya sebagai Juara I Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Piagam penghargaan diberikan kepada PIK Remaja “Taruna Harapan” sebagai Juara Harapan II PIK Remaja Jalur Masyarakat Tingkat Nasional dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
6. Piagam penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai PPID Kabupaten/Kota se Jawa Timur dengan kategori “ B ” (TERBUKA) dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
7. Piagam penghargaan diberikan kepada Puskesmas Kauman sebagai Juara III Kategori Puskesmas Pedesaan pada Pemilihan Puskesmas berprestasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dari Gubernur Jawa Timur.
8. Piagam penghargaan diberikan kepada Puskesmas Sukosari sebagai Juara I Lomba Poster Edukatif Keswamas dalam kegiatan Jambore Kesehatan Jiwa Jawa Timur Tahun 2017.
9. Piagam penghargaan diberikan kepada Desa Jurug Kecamatan Sooko sebagai TERBAIK Kategori Madya Bidang Inovasi Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari Gubernur Jawa Timur.
10. Piagam penghargaan diberikan kepada Desa Bringinan Kecamatan Jambon sebagai Juara Terbaik III Kategori Desa dalam Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dari Gubernur Jawa Timur.
11. Piagam penghargaan diberikan kepada Kelompok PUSYAN GATRA “Bahtera Kencana” sebagai Juara III Lomba Kelompok PUSYAN GATRA tahun 2017 dari

Gubernur Jawa Timur..

12. Piagam penghargaan diberikan kepada Kelompok BKL “Ngudi Rahayu” sebagai Juara I Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia Tahun 2017 dari Gubernur Jawa Timur.
13. Piagam penghargaan diberikan kepada Kelompok PIK-R Taruno Harapan sebagai Juara Harapan II PIK Remaja Jalur Masyarakat Tingkat Nasional dalam rangka Gebyar Temu Kader Pengelola dan Pelaksana Program Pembangunan Keluarga Tingkat Nasional dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
14. Piagam penghargaan diberikan kepada BUMDesa “Arum Dalu” Desa Ngabar Kecamatan Siman sebagai Juara II Lomba Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dari Gubernur Jawa Timur.
15. Piagam penghargaan diberikan kepada Naila Puspitasari, S.Ag. M.Si sebagai Juara 3 Lomba PKB/PLKB Teladan Tahun 2017 dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
16. Piagam penghargaan diberikan kepada Wiji S sebagai Juara 4 Lomba PPKBD/Sub PPKBD (IMP) Teladan Tahun 2017 dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
17. Piagam penghargaan diberikan kepada Sudibyo Saputro sebagai Juara I Lomba ILM Website <http://kbjatim.info> dari Gubernur Jawa Timur.
18. Piagam penghargaan diberikan kepada Desa Pupus Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sebagai Pemenang Terbaik III Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Kategori Kabupaten.
19. Piagam penghargaan diberikan kepada Binti Rosidah, S.Pd sebagai Juara III Tutor Pendidikan Keaksaraan dalam rangka Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
20. Piagam penghargaan diberikan kepada Crysna Rhany Ningrum, S.Kom (SMPN 1 Ponorogo) sebagai Juara I Lomba Web/Blog Pembelajaran SMP dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
21. Piagam penghargaan diberikan kepada Crysna Rhany Ningrum, S.Kom (SMPN 1 Ponorogo) sebagai Juara Harapan Lomba Media Presentasi Pembelajaran Bagi Tenaga Pendidik Jenjang SMP/MTs dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
22. Piagam penghargaan diberikan kepada Maryono Desa Ngabar Kecamatan Siman sebagai Juara II Pemangku Ketahanan Pangan Kategori Pemangku dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
23. Piagam penghargaan diberikan kepada Aziz Lubis, SP, Desa Bungkal Kecamatan Bungkal sebagai Juara I Penyuluh Pertanian Teladan Kategori Penyuluh Pertanian PNS dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
24. Piagam penghargaan diberikan kepada Gapoktan “Rukun Makmur” Desa Belang

- Kecamatan Bungkal sebagai Juara II Kategori GAPOKTAN PUAP Lomba Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultur Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dari Gubernur Jawa Timur.
25. Piagam penghargaan diberikan kepada Gapoktan “Rukun Makmur” Desa Purwosari Kecamatan Babadan sebagai Juara I Pelaku Ketahanan Pangan Kategori Poktan/Gapoktan Pemberdayaan Masyarakat dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
  26. Piagam penghargaan diberikan kepada Gapoktan “Gemah Ripah” Desa Paringan Kecamatan Jenangan sebagai Juara III Gabungan Kelompok Tani Berprestasi Kategori Gapoktan dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
  27. Piagam penghargaan diberikan kepada Afwa Zakia AL-Azkaf sebagai Juara Favorit Duta Gemar Ikan Jawa Timur Tahun 2017 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
  28. Piagam penghargaan diberikan kepada Agra Hadi Abdurrachman sebagai Juara Favorit Duta Gemar Ikan Jawa Timur Tahun 2017 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
  29. Piagam penghargaan diberikan kepada Sutikno sebagai Juara II Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Bidang Instalasi Listrik dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
  30. Piagam penghargaan diberikan kepada Yazid Fauzi sebagai Juara II Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Bidang Pemasangan Keramik dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
  31. Piagam penghargaan diberikan kepada Wiwing Prasetyo sebagai Juara I Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Bidang Batu Bata dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
  32. Piagam penghargaan diberikan kepada Forrest Management Unit (FMU) “Enggal Mulyo” sebagai Penyelamat Lingkungan pada penghargaan pelestari lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur dari Gubernur Jawa Timur.
  33. Piagam penghargaan diberikan kepada SMPN 1 Balong sebagai Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan dari Gubernur Jawa Timur.
  34. Piagam penghargaan diberikan kepada SDN 1 Karang sebagai Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan dari Gubernur Jawa Timur.
  35. Piagam penghargaan diberikan kepada MTsN Sampung sebagai Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan dari Gubernur Jawa Timur.
  36. Piagam penghargaan diberikan kepada MTs Assalam sebagai Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan dari Gubernur Jawa Timur.